

BAB III

Sikap Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Terhadap Buku-buku PMP

III. 1 Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

Tahun 1966, menjadi kejatuhan Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno. Demokrasi Terpimpin digantikan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru membawa harapan keadaan jauh lebih baik dibandingkan zaman sebelumnya, termasuk kalangan Islam. Namun, harapan kalangan Islam untuk dapat berperan di bidang politik seperti masa demokrasi liberal tidak pernah terwujud. Harapan kalangan Islam kembali pupus oleh depolitisasi yang dilakukan terhadap kalangan Islam di masa Orde Baru.

Usaha untuk kembali dalam bidang politik mengalami kegagalan. Kalangan Islam terutama tokoh-tokoh Masyumi memilih jalur dakwah untuk tetap berperan pada saat itu. Untuk mewadahi kegiatan-kegiatan dakwah tersebut, dibentuklah DDII pada 26 Februari 1967.

Meskipun kegiatan-kegiatan DDII lebih difokuskan pada peningkatan mutu dakwah di Indonesia. Namun, bukan berarti DDII tidak memberikan perhatian terhadap masalah-masalah politik pemerintah Orde Baru.

III. 1. 1 Berdirinya DDII

Pada 26 Februari 1967 dalam rangka halalbihalal Pengurus Masjid Al-Munawaroh Tanah Abang mengundang ulama se-Jakarta.¹¹⁶ Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh, seperti M. Natsir, H. M. Rasyidi, K. H. Taufiqurrahman, Haji Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, dan Haji Nawawi Duski. Dalam pertemuan tersebut, dibahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam. Adapun hasil dari musyawarah yang dilaksanakan saat itu, adalah¹¹⁷

1. Menyatakan rasa syukur atas hasil dan kemajuan yang telah dicapai hingga kini dalam usaha-usaha dakwah yang terus menerus dilakukan oleh

¹¹⁶ "Dewan Dakwah Islamijah Indonesia", *loc. cit.*, hlm. 14.

¹¹⁷ Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah: Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, (Jakarta, 1997). Hlm. 9.

berbagai kalangan umat, yakni para alim ulama dan para mubalig secara pribadi, serta usaha-usaha yang telah dicapai dalam rangka organisasi dakwah.

2. Memandang perlu (*urgent*) lebih ditingkatkan hasil dakwah hingga taraf yang lebih tinggi sehingga tercipta suatu keselarasan antara banyaknya tenaga lahir yang dikerahkan dan banyaknya tenaga batin yang dicurahkan dalam rangka dakwah tersebut.

Untuk meningkatkan mutu dakwah serta menindaklanjuti hasil musyawarah tersebut, dinilai ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu¹¹⁸

1. Mutu dakwah yang di dalamnya tercakup persoalan penyempurnaan sistem perlengkapan, peralatan, peningkatan teknik komunikasi, lebih-lebih lagi sangat dirasakan perlunya dalam usaha menghadapi tantangan (konfrontasi) dari bermacam-macam usaha yang sekarang giat dilancarkan oleh penganut agama-agama lain dan kepercayaan-kepercayaan (antara lain faham anti-Tuhan yang masih merayap di bawah tanah), Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan sebagainya terhadap masyarakat Islam.
2. *Planning* dan integrasi yang didalamnya tercakup persoalan-persoalan yang diawali oleh penelitian (*research*) dan disusul oleh pengintegrasian segala unsur dan badan-badan dakwah yang telah ada dalam masyarakat ke dalam suatu kerja sama yang baik dan berencana.

Berdasarkan hasil musyawarah tersebut dibentuklah DDII untuk menampung serta mengatasi permasalahan dakwah yang cukup rumit.

DDII didirikan sebagai lembaga konsultasi bagi para *da'i* yang memerlukannya. Selain itu, DDII juga berfungsi sebagai laboratorium untuk meningkatkan kualitas *da'i*. *Da'i* diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya dengan melakukan penelitian. *Da'i* juga dituntut agar tidak hanya dapat berdakwah di kalangan kaumnya saja, tetapi dapat berdakwah dalam kalangan yang lebih luas.¹¹⁹

Susunan pengurus pertama DDII ketika didirikan adalah

Ketua: Mohammad Natsir,

Wakil Ketua: Dr. H.M Rasjidi.

¹¹⁸ *Ibid.*,

¹¹⁹ "Dewan Dakwah Islamijah Indonesia", *loc. cit.*, hlm. 15.

Sekretaris & Wakil: Buchari Tamam & Nawawi Dusky.

Bendahara: H. Hasan Basri.

Anggotanya: K.H. Taufiqurrahman,
 Prof. Mochtar Lintang,
 H. Z. Abidin Ahmad,
 Prawoto Mangkusasmito,
 H. M. D. Dt. Palimo Kajo,
 Osman Raliby, dan
 Abdul Hamid.¹²⁰

III. 1. 2 Landasan, Ciri Organisasi

DDII melandaskan kebijakannya pada empat hal, yaitu¹²¹

1. Yayasan DDII berdasarkan takwa dan keridaan Allah.
2. Dalam mencapai maksud dan tujuannya, Dewan Dakwah mengadakan kerja sama yang erat dengan badan-badan dakwah yang telah ada di Indonesia.
3. Dalam hal yang bersifat kontroversial (saling bertentangan) dan dalam usaha melicinkan jalan dakwah, Dewan Dakwah bersikap menghindari dan atau mengurangi pertikaian paham antarpendukung dakwah dan istimewa dalam melaksanakan tugas dakwah.
4. Di mana perlu ada dan dalam keadaan mengizinkan, Dewan Dakwah dapat tampil mengisi kekosongan, antara lain menciptakan suatu usaha berbentuk atau bersifat dakwah, usaha mana sebelumnya belum pernah diadakan, seperti mengadakan *pilot projek* dalam bidang dakwah.

Selain itu, DDII mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. DDII bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan Islami dengan menggiatkan dan meningkatkan mutu dakwah di Indonesia melalui penanaman akidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, membendung pemurtadan, *ghazwu 'l-*

¹²⁰ *Ibid.*,

¹²¹ Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, *op. cit.*, hlm. 10.

*fikri*¹²² dan *harakah haddamah*¹²³, mengembangkan jaringan kerja sama, serta berkoordinasi ke arah realisasi aura *jama'i* serta membangun solidaritas Islam Internasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia.¹²⁴

DDII mempunyai ciri organisasi, yaitu¹²⁵

1. Dewan dakwah adalah organisasi keagamaan bergerak di bidang dakwah *ila 'i-laah* dengan melaksanakan *amr bi'l-ma'ruf nahi 'ani 'l munkar*.
2. Dewan dakwah bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang diwujudkan dalam kegiatan pembangunan ummat, bangsa, dan negara, khususnya dalam membina aqidah, menegakkan syariat, membina persatuan umat, mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta membangun solidaritas umat sedunia.
3. Dewan dakwah bersifat independen, terbuka bagi seluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran dan golongan sepanjang memiliki kesamaan akidah serta kesamaan visi dan misi dalam menegakkan dan memperjuangkan *dinu 'l-Islam*.
4. Dewan dakwah bersifat mandiri yang dicerminkan dalam sikap organisasi, pemikiran, pengambilan keputusan, penyelenggaraan kegiatan dengan bertumpu pada kemampuan sendiri.
5. Dewan dakwah bersifat koordinatif, mengutamakan kebersamaan secara sinergis dengan sesama lembaga-lembaga Islam, baik nasional maupun internasional.

III. 1. 3 Kegiatan DDII

Sebagai organisasi DDII memiliki berbagai macam kegiatan. Adapun kegiatan tersebut mengacu pada anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan oleh DDII. Berdasarkan anggaran rumah tangga kegiatan DDII, yaitu

1. Melaksanakan *khittah* dakwah, anggaran dasar, anggaran rumah tangga untuk terwujudnya tatanan kehidupan yang Islami dengan menggiatkan

¹²² Perang pemikiran

¹²³ Sempalan

¹²⁴ *Anggaran Rumah Tangga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, (Jakarta, 2007). Hlm. 3.

¹²⁵ *Ibid.*,

dan meningkatkan mutu dakwah di Indonesia yang berasaskan Islam, takwa dan keridaan Allah *Ta'ala*.

2. Menanamkan akidah dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Menyiapkan *du'at* untuk berbagai tingkatan sosial kemasyarakatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas dakwah.
4. Menyadarkan ummat akan kewajiban dakwah dan membina kemandirian mereka.
5. Membendung pemurtadan, *ghazwul fikri*, dan *harakah-haddamah*.
6. Mengembangkan jaringan kerja sama serta koordinasi ke arah realisasi *amal jama'i*.
7. Memberdayakan hubungan dengan berbagai pihak: pemerintah dan lembaga lainnya bagi kemaslahatan umat dan bangsa,
8. Membangun solidaritas Islam internasional dan turut serta menciptakan perdamaian dunia.¹²⁶

Untuk mencapai kegiatan-kegiatan tersebut DDII melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Berusaha memperlengkapi persiapan para mubalighien dalam melaksanakan tugasnya di bidang ilmiah (*sic!*), *khittah*, dan alat-alat sehingga dapat mencapai hasil yang lebih sempurna dan terwujudnya penegak dakwah.
- b. Mengadakan kerja sama yang erat dengan badan-badan dakwah yang ada.
- c. Berusaha melicinkan jalan dakwah dengan dan antara lain menghindari dan/atau mengurangi pertikaian paham antarpendukung dakwah dalam melaksanakan tugas dakwah.
- d. Mengusahakan adanya dana bagi kepentingan dakwah dan kesejahteraan pendukung dakwah.¹²⁷

Dalam penerapannya di lapangan kegiatan-kegiatan DDII memfokuskan pada peningkatan kualitas *da'i* juga memaksimalkan peranan masjid. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh DDII, antara lain *pertama*, mempersiapkan para *da'i*

¹²⁶ *Anggaran Rumah Tangga Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*, (Jakarta, 2007). Hlm. 7.

¹²⁷ Hakiem, *op. cit.*, hlm. 235.

yang akan disebar ke seluruh pelosok tanah air sebagai. Pada masa awal pembentukannya, DDII bekerja sama dengan Gerakan Muballigh Islam Lampung menyelenggarakan pelatihan juru dakwah se-Provinsi Lampung di Tanjungkarang.

Kedua, DDII memaksimalkan peranan masjid sebagai pusat dakwah. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan membina Balai Kesehatan Rakyat di Masjid Munawarah dan di Jati Baru (Jakarta Pusat) dan mempersiapkan Lembaga Kesehatan Mubalighin bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI-HMI).¹²⁸ Selain itu, DDII juga membantu pembangunan masjid-masjid kampus dan pusat kegiatan Islam (*Islamic Centre*) di daerah lingkungan kampus.¹²⁹

Ketiga, di bidang penerbitan DDII memelopori penerbitan bermacam publikasi tentang khutbah, ceramah, dan perkembangan dakwah Islam, baik nasional maupun internasional, sebagai bahan yang harus diketahui oleh juru dakwah. DDII menerbitkan majalah anak-anak *Sahabat*, majalah *Suara Masjid*, majalah *Serial Khutbah Jum'at*, dan majalah *Media Dakwah*. *Media Dakwah* diterbitkan khusus kepada para *da'i* yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, tokoh-tokoh umat dan sebagian pimpinan pusat organisasi dan lembaga-lembaga Islam di dalam dan luar negeri.¹³⁰

Keempat, DDII berusaha membuat standar kurikulum pesantren bekerja sama dengan sejumlah pesantren di Jawa Barat. Upaya DDII untuk membuat kurikulum pesantren ini dimaksudkan agar pesantren tidak ketinggalan materi-materi umum dan keterampilan. Pesantren Darul Fallah di Ciampea, Bogor sebuah sekolah pertanian swasta yang memadukan materi keislaman dengan materi-

¹²⁸ Hakiem, *op. cit.*, hlm. 236. lihat juga dalam Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, *Menunaikan Panggilan Risalah: Dokumentasi Perjalanan 30 Tahun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia*. (Jakarta, 1997), hlm. 25-28.

¹²⁹ Adapun masjid dan *Islamic Centre* yang dibantu pelaksanaannya oleh DDII, yaitu: (1) Masjid Arif Rahman Hakim di kampus UI, Jalan Salemba Raya, Jakarta, (2) Masjid Sultan Alauddin di kampus Universitas Muslimin Indonesia (UMI), Ujung Pandang, (3) Islamic Centre Al-Quds di Padang, (4) Masjid Fatahillah dekat kampus UI, Depok, (5) Masjid Al-Hijri di Kampus Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, (6) Masjid At-Taqwa di kampus IKIP Rawamangun (sekarang UNJ), Jakarta, (7) Islamic Centre Shalahuddin, Yogyakarta, (8) Islamic Centre Ibrahim Mailim, Surakarta, (9) Islamic Centre Darul Hikmah di dekat kampus Universitas Lampung, di Bandar Lampung, (10) Islamic Centre Ruhul Islam di Magelang, (11) Masjid Sultan Trengganu di Semarang, (12) Masjid Al-Furqan di kampus IKIP Bandung (sekarang UPI), (13) Masjid IKIP Malang (sekarang UM). Lihai dalam Lukman Hakiem dan Tamsil Linrung, *op. cit.*, hlm. 31.

¹³⁰ *Ibid.*,

materi umum dan keterampilan merupakan salah satu contoh dari proyek yang berhasil dibantu DDII dalam rangka memberi arah modernisasi desa. Proyek-proyek lain yang dibantu DDII ialah Dana Al-Falah di Bandung, Wisma Tani, dan Sekolah Tinggi Aqabah di Sumatera Barat.¹³¹

III. 2 Tokoh DDII

DDII didirikan oleh sejumlah tokoh Masyumi yang tidak mendapatkan tempat di pemerintahan pada masa Orde Baru. Tokoh-tokoh Masyumi tersebut melihat masih ada jalan bagi mereka untuk berkiprah meskipun dalam bidang yang berbeda dibanding masa sebelumnya. Salah satu tokoh Masyumi yang menjadi Ketua Umum DDII sejak berdirinya hingga tahun 1993 adalah Mohammad Natsir.

1. Mohammad Natsir

Salah seorang tokoh sentral DDII dan menjadi Ketua DDII sejak pertama kali didirikan hingga wafatnya tahun 1993 adalah Mohammad Natsir.¹³² Mohammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Sumatera Barat tanggal 17 Juli 1908. Natsir lahir dari seorang ibu yang bernama Khadijah dan ayah yang bernama Idris Sutan Saparido. Ayahnya seorang jurutulis kontrolir di Sumatera Barat kemudian menjadi sipir penjara di Makassar.

Sebagaimana kebanyakan orang Minang lainnya bahwa setiap anak laki-laki apabila sudah dewasa dan menikah akan diberikan gelar. Natsir pun diberikan gelar setelah menikah dengan Nurnahar pada 20 Oktober 1924, yaitu bergelar *Datuk Sinaro Panjang*.¹³³

Riwayat intelektual pertama Natsir dimulai ketika Natsir menuntut ilmu di HIS Adabiyah, Padang.¹³⁴ Natsir bermaksud menuntut ilmu di HIS (*Hollands*

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² Riwayat lengkap kehidupan Natsir lihat dalam Yusuf Abdullah Puar. *Muhammad Natsir: 70 Tahun Kenang-Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*, (Jakarta, 1978). Dalam biografi ini dipaparkan kehidupan Natsir sejak bersekolah di HIS hingga menjadi Ketua DDII, meskipun ada bagian yang hilang dari perjalanan hidupnya yaitu peranan beliau dalam PRRI-Permesta.

¹³³ Yusuf Abdullah Puar, *op. cit.*, hlm. 2.

¹³⁴ HIS Adabiyah Padang didirikan pada 23 Agustus 1915 oleh Syarikat Usaha yang dipimpin oleh H. Abdullah Ahmad. HIS Adabiyah Padang bersifat terbuka untuk semua golongan dalam masyarakat, terutama golongan tani, pedagang, dan buruh yang tidak dapat memasuki sekolah pemerintah.

Inlandse School), Padang, tetapi Natsir sebagai anak pegawai rendah hanya mampu bersekolah di HIS Adabiyah, Padang.

Setelah beberapa bulan bersekolah di HIS Adabiyah, Padang, Natsir mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di HIS Solok, Padang. Natsir pindah ke Solok selama bersekolah di HIS dan tinggal di rumah seorang saudagar bernama Haji Musa. Saat tinggal di rumah Haji Musa, selain belajar di HIS Natsir juga memperdalam pengetahuan Islam. Pagi hari Natsir bersekolah di HIS, sore hari di sekolah Diniyah, yakni mempelajari bahasa Arab dan fikih, dan malam hari mempelajari Alquran.¹³⁵

Setelah tamat dari HIS Solok dan Madrasah Diniyah, Natsir melanjutkan ke MULO (setingkat dengan SMP). Selama bersekolah di MULO, Natsir mulai aktif dalam *Jong Islamiten Bond* (JIB),¹³⁶ Padang, yang diketuai oleh Sanusi Pane. Natsir menganggap organisasi di luar sekolah memiliki arti yang penting bagi kesadaran hidup bermasyarakat. Menurutnya, dari organisasi itulah, tumbuh orang-orang yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa.¹³⁷

Setelah tamat MULO, Natsir melanjutkan ke *Algemene Middelbare School* (AMS) di Bandung. Saat Natsir menuntut ilmu di Bandung dia berkenalan dengan A. Hassan¹³⁸ tokoh Persatuan Islam (Persis) di Bandung. A. Hassan seorang tokoh

¹³⁵ Yusuf Abdullah Puar. *op. cit.*, hlm. 5.

¹³⁶ JIB merupakan organisasi kepemudaan yang didirikan oleh Samsuridjal, salah seorang tokoh Jong Java. Samsuridjal menginginkan Jong Java tidak netral agama, memperjuangkan Islam tetapi usul Samsuridjal tersebut tidak terealisasi. Oleh karena usulnya yang tidak terealisasi, Samsuridjal mendirikan JIB pada tahun 1925. Samsuridjal menjabat sebagai ketuanya, sedangkan Haji Agus Salim sebagai penasehatnya. Dalam Kongres I JIB bulan Desember 1925 Samsuridjal mengungkapkan pidato mengenai pendirian JIB. Ia mengungkapkan bagaimana pencarian seorang pemuda dari keluarga yang beragama Islam akan Islam sebagai sebuah ideologi. Dalam pencariannya itu pemuda tersebut diwariskan Islam serta tata-cara ibadah dalam Islam tanpa mengetahui untuk apa hal tersebut dilakukan. Sampai pada akhirnya pemuda Islam itu menyadari Islam sebagai jalan ketenangan dan jalan hidup mereka. Lihat dalam A. K. Pringgogidgo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta, 1991), hlm. 115.

¹³⁷ Yusuf Abdullah Puar. *op. cit.*, hlm. 8.

¹³⁸ A. Hassan lahir di Singapura tahun 1887. Beliau lahir dari keturunan Indonesia dan India. Ayahnya bernama Ahmad yang juga bernama Sinna Vappu Maricar, seorang penulis dan kesusastraan Tamil. Ahmad pernah menjadi Direktur dari *Nur al-Islam*, sebuah majalah sastra Tamil, menulis beberapa buah kitab dalam bahasa Tamil dan juga beberapa terjemahan dari bahasa Arab. Ibunya berasal dari keluarga sederhana di Surabaya tetapi sangat taat beragama. A. Hassan tidak pernah menyelesaikan sekolah dasarnya di Sngapura. Ia mulai bekerja pada umur 12 tahun, tetapi ia mengambil privat dan berusaha untuk menguasai bahas Arab untuk mempelajari Islam. Sejak tahun 1910-1921 A. Hassan melakukan berbagai perkerjaan, seperti guru, pedang tekstil, menjadi agen untuk distribusi es, juru tulis di kantor jemaah Haji, dan juga sebagai anggota redaksi *Utusan Melayu*. Tahun 1921, A. Hassan pindah ke Surabaya untuk menjalankan pabrik tekstil milik pamannya H. Abdul Latif. Kemudian, A. Hassan mengunjungi Bandung untuk mempelajari

Persis keturunan India yang memiliki pengetahuan cukup mendalam tentang Islam. Karena pengetahuannya akan Islam, ia ditunjuk sebagai guru agama di Persis. A. Hassan dikenal dengan tulisan-tulisannya yang cukup tajam dalam membela kemusnahan Islam. A. Hassan juga menyusun tafsir Al-Furqan. Natsir tertarik dengan A. Hassan karena kesederhanaannya, kerapian kerjanya, kealimannya, ketajaman pikirannya. A. Hassan seorang yang 'alim, seorang pengusaha yang mahir, dan pandai berdebat. A. Hassan adalah tokoh yang paling mempengaruhi pemikiran M. Natsir.¹³⁹

Selain aktif di Persis, Natsir sempat menjabat sebagai ketua JIB (1928-1932). Di JIB Natsir berkenalan dengan Haji Agus Salim (SI) dan Syekh Ahmad Syurkati (Al-Irsyad). Anggota JIB sangat dipengaruhi oleh ketokohan Haji Agus Salim. Hal ini disebabkan akan kepintarannya, kemampuannya berpidato, pengalamannya yang bertahun-tahun dalam bidang politik, wibawanya, serta kepribadiannya. Oleh karena sifat Salim itu, Natsir dikenal dalam bidang politik yang senantiasa dibingkai dengan nilai kecendekiawanan dan moral.¹⁴⁰

Setamat AMS, Natsir mendapatkan beasiswa di Fakultas Hukum Jakarta atau Fakultas Ekonomi di Rotterdam, tetapi tawaran beasiswa tersebut ditolak oleh Natsir. Natsir lebih memilih untuk mempelajari Islam lebih dalam di Persis dibandingkan menjadi pegawai pemerintah. Pagi hari, Natsir bekerja bersama A. Hassan menerbitkan majalah *Pembela Islam*, sedangkan malam hari menelaah tafsir Alquran serta dibacanya kitab-kitab dalam bahasa Inggris dan Arab.¹⁴¹

Selain mempelajari Islam lebih dalam, Natsir juga memiliki perhatian cukup besar dalam dunia pendidikan. Natsir berpendapat pendidikan secara Barat hanya mampu menunjang otak saja, tetapi jiwanya kosong. Untuk itulah, Natsir mendirikan Pendidikan Islam (Pendis)¹⁴² sebagai pendidikan Islam yang dapat

cara-cara menenun pada lembaga tekstil pemerintahan. Hal ini dilakukannya untuk membekali dirinya dengan kemampuan menenun karena ia bermaksud membuka pabrik tekstil di Surabaya bersama kawan-kawannya. Di Bandung, A. Hassan tinggal pada H. Muhammad Yunus, salah seorang pendiri Persis. Akhirnya, A. Hassan aktif sebagai tokoh Persis setelah perkenalannya dengan H. Muhammad Yunus. Lihat dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta, 1996), hlm., 97-99.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm., 16-17.

¹⁴⁰ Frenki. *Hubungan Islam dengan Negara*. Tesis. Pascasarjana-UI. Hlm., 64.

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 20-21.

¹⁴² Perhatian Natsir dibidang pendidikan dimulai sejak Natsir membuka kursus sore hari. Kursus tersebut dimaksudkan Natsir sebagai aplikasi dari hal-hal yang dipelajarinya mengenai pendidikan juga untuk menambah penghasilan. Pada awalnya kursus tersebut hanya dihadiri oleh lima orang

merintis jalan bagi putera-puteri Islam.¹⁴³ Untuk menunjang kemampuannya di bidang pendidikan, Natsir melanjutkan kursus guru pada *Lagere Onderwijs*. Natsir mendirikan sekolah Pendidikan Islam (Pendis) meskipun Pendis hanya mampu bertahan selama sepuluh tahun karena kendala dana.

Pada tahun 1938, Natsir mulai aktif dibidang politik dengan menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Pada tahun 1940-1942 Natsir menjabat sebagai Ketua PII Bandung dan merangkap sebagai Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta.¹⁴⁴

Pada revolusi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dibentuk tanggal 7 dan 8 November 1945 sebagai hasil kesepakatan dalam Mukhtamar Islam Indonesia di Yogyakarta. Mukhtamar tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh berbagai organisasi Islam dari masa sebelum perang serta masa pendudukan Jepang. Masyumi dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam.¹⁴⁵ Natsir juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Masyumi selama tahun 1949-1958.¹⁴⁶

Pada masa revolusi, Natsir sempat menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945-1946. Natsir juga dipercaya menjabat sebagai Menteri Penerangan RI selama tahun 1946-1949. Presiden Soekarno tidak keberatan ketika Natsir diajukan sebagai Menteri Penerangan, bahkan Presiden Soekarno berkata "*hijs is de man*" (dialah orangnya). Periode ini mencatat sebagai masa saat hubungan Soekarno dengan Natsir cukup baik meskipun pada masa 1930-an pernah terjadi polemik di antara mereka berdua. Kedekatan antara

muridnya. Murid-muridnya tersebut merupakan keluaran HIS partikelir yang tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Lama-kelamaan murid-muridnya bertambah sedangkan ruangan yang dipakainya tidak memadai lagi. Melihat kondisi ini, Haji Muhammad Yunus salah seorang tokoh Persis memberikan bantuan pinjaman untuk memenuhi sarana belajar siswa-siswa Natsir. Saat Natsir mengikuti kursus guru pada *Lagere Onderwijs*, ia menyusun rencana untuk mendirikan "Pendidikan Islam" (Pendis). Keinginan Natsir mendirikan Pendis didorong oleh keinginan untuk membangun suatu sistem pendidikan yang sesuai dengan hakikat ajaran Islam. System pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah melahirkan kecerdasan otak dan keimanan kepada Allah dan Rasul. Mengenai pendirian Pendis lihat dalam Yusuf Abdullah Puar, *Muhammad Natsir 70 Tahun...*, *op. cit.*, hlm., 29-41.

¹⁴³ M. Natsir. *Capita Selecta* (Jakarta, 1954), hlm. 77-85.

¹⁴⁴ Thohir Luth. *op. cit.*, hlm., 24.

¹⁴⁵ Mengenai pembentukan Masyumi lihat dalam Deliar Noer, *Partai Islam...* (Jakarta, 2000), hlm., 51.

¹⁴⁶ Yusuf Abdullah Puar. *op. cit.*, hlm. 405.

Soekarno dan Natsir juga dibuktikan dengan naskah pidato kenegaraan Presiden yang selalu ditangani oleh Natsir sebagai Menteri Penerangan.¹⁴⁷

Karir puncak Natsir tidak terlepas dari prestasinya dengan mengemukakan Mosi Integral¹⁴⁸ dalam sidang parlemen RIS pada 19 April 1950.¹⁴⁹ Mosi integral sebagai prestasi yang gemilang sehingga mengantarkannya Natsir sebagai Perdana Menteri meskipun Natsir hanya menjabat selama delapan bulan sejak 6 September 1950—27 April 1951.¹⁵⁰

Tahun 1958 Natsir mengambil sikap konfrontatif dengan Presiden Soekarno. Sikap ini diambil olehnya karena Presiden Soekarno dianggap telah melanggar UUDS 1950. Bersama dengan kedua tokoh Masyumi lainnya, yaitu Burhanuddin Harahap dan Syafruddin Prawiranegara, Natsir turut aktif dalam PRRI-Permesta. Sebagai akibat dari perbuatannya yang dianggap melakukan pemberontakan, Natsir dikirim ke Batu, Malang (1962—1964), Syafruddin Prawiranegara ke Jawa Tengah, Burhanuddin Harahap ke Pati, Jawa Tengah. Natsir dijebloskan ke Rumah Tahanan Militer (RTM) di Jakarta tahun 1964—1966, kemudian dibebaskan setelah Demokrasi Terpimpindigantikan oleh Orde Baru.¹⁵¹

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Natsir tidak mendapatkan tempat dalam pemerintahan.¹⁵² Hal ini disebabkan Natsir dianggap sebagai pemberontak yang terlibat dalam pemberontakan PRRI-Permesta. Selain itu, pemerintah Orde Baru bersikap keras terhadap kalangan Masyumi yang dikategorikan sebagai kalangan ekstrem kanan.

Upaya untuk kembali mengambil peranan dalam pemerintahan mengalami jalan buntu sehingga tokoh-tokoh Masyumi mendirikan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia pada 26 Februari 1967. Dalam organisasi ini, Natsir ditunjuk menjadi ketuanya sejak didirikan hingga wafatnya tahun 1993. Melalui organisasi ini,

¹⁴⁷ *Ibid.* hlm. 78-80.

¹⁴⁸ 17 Agustus 1950 Indonesia kembali ke Negara kesatuan sebagai bentuk pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS), salah satu kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Mosi integral yang dibacakan oleh Natsir di depan Dewan Perwakilan RIS tanggal 3 April 1950 dijadikan acuan untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang ketika itu dihadapi. Mosi ini juga ditandatangani oleh sebelas orang yang mewakili seluruh fraksi di parlemen.

¹⁴⁹ Yusuf Abdullah Puar. *op. cit.*, hlm. 94-100.

¹⁵⁰ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta, 1993), hlm. 659.

¹⁵¹ Thohir Luth. *op. cit.*, hlm. 25.

¹⁵² *Ibid.*

Natsir melalui perjuangannya melalui format dakwah berbeda dengan masa-masa sebelumnya melalui format politik.¹⁵³

Kiprah Natsir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Natsir menjadi *Vice President World Muslim Congress* yang bermarkas di Karachi, anggota *World Muslim League* (Rabithah Alam Islamy), anggota Majelis *A'la Al-Alamy lil Masjid* (Dewan Masjid Sedunia) yang bermarkas di Mekkah.

Pada 6 Februari 1993, M. Natsir meninggal di rumah sakit Cipto Mangunkusumo dalam usia 85 tahun. Mantan Perdana Menteri Jepang yang diwakili oleh Nakadjima menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya Natsir dengan ungkapan, “berita wafatnya M. Natsir terasa lebih dahsyat dari jatuhnya bom atom di Hiroshima.”¹⁵⁴

Menurut Natsir, negara dan agama merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Pernyataan tersebut, menurut Natsir, berdasarkan pada sebuah ayat dalam Alquran surat *Ad-Dzariyat* ayat 56 yang berbunyi: “*Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia itu, melainkan untuk mengabdikan kepada-Ku.*” Ayat Alquran tersebut menyiratkan sebagai seorang muslim hendaknya menjadi seorang muslim yang mencapai kebahagiaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Permasalahan dunia dan akhirat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹⁵⁵

Bagi Natsir, Islam tidak hanya sekadar agama yang dianggap hanya peribadatan, seperti salat, puasa saja. Akan tetapi, agama dalam pengertian Islam meliputi semua kaidah-kaidah, *hudud-huhud* (batasan-batasan) dalam *muamalah* (pergaulan) dalam masyarakat, menurut garis-garis yang telah ditetapkan dalam Islam. Untuk menjaga agar aturan-aturan tersebut berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan suatu kekuasaan dalam negara. Menurut Natsir, bukan agama yang harus dipisahkan dari Negara, tetapi yang harus dipisahkan adalah kejahatan, kemaksiatan, kesombongan yang tela menghancurkan kekuatan umat.¹⁵⁶

Selain itu, Natsir juga berpendapat negara hanyalah alat bukan tujuan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang Islam, baik yang berkenaan dengan kehidupan individu maupun sebagai bagian

¹⁵³ M. Natsir. “Politik Melalui Jalur Dakwah.” *Tempo* 2 Desember 1989.

¹⁵⁴ Thohir Luth. *op. cit.*, hlm. 27-26.

¹⁵⁵ M. Natsir. *Capita Selecta*. (Jakarta, 1973), hlm. 436.

¹⁵⁶ *Ibid.*

dari masyarakat. Menurut Natsit tidak ada *ijma'* ulama yang memerintahkan untuk memisahkan Negara dari agama.¹⁵⁷

2. Anwar Harjono¹⁵⁸

Anwar Harjono pernah menjabat sebagai Ketua Umum DDII periode tahun 1997. Sebelum menjadi Ketua Umum DDII, Anwar Harjono menjabat sebagai Ketua III DDII periode 1993-1997.

Pada 8 November 1923, pasangan suami-istri Tamsir dan Datun berbahagia karena telah lahir anak pertama mereka yang diberi nama Harjono di Krian, Surabaya. Ayahnya bekerja sebagai kepala kantor pos Krian desa Nglorok, Surabaya. Harjono merupakan anak pertama dari enam bersaudara.¹⁵⁹

Harjono dibesarkan dalam lingkungan santri dan dalam usia dini telah diperkenalkan akan nilai-nilai Islam. Selain orang tua yang mengajarnya mengenai Islam, Harjono juga mendapatkan pendidikan Islam dari ulama yang terkenal di daerahnya tersebut. Ulama tersebut biasa dipanggil dengan nama Kiai Mas, beliau lah yang mengajarkan Harjono mengenai Al-Qur'an dan doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an.¹⁶⁰

Tamsir, ayah Harjono, juga melibatkan perasaan anak-anaknya dalam suasana pergerakan nasional. Meskipun ayahnya seorang pegawai pemerintah, dia merupakan salah seorang simpatisan Sarekat Islam (SI). Setelah mengikuti rapat umum SI, Tamsir sering berdialog dengan anak-anaknya mengenai kegiatan tersebut.¹⁶¹

Harjono memulai pendidikannya di Taman Siswa¹⁶² yang berlokasi di Mojokerto. Ayahnya memasukkan Harjono di Taman Siswa karena di Krian belum didirikan HIS. Keputusan ayahnya untuk menyekolahkan Harjono di

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Mengenai biografi lengkap Anwar Harjono lihat dalam Lukman Hakiem. *Perjalanan Mencari...op. cit.*

¹⁵⁹ Lukman Hakiem. *op. cit.*, hlm., 20

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Taman Siswa didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara seorang bangsawan Pura Paku Alaman, Yogyakarta, karena kecemasannya atas nasib pribumi yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda. Taman Siswa didirikan pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa mendapatkan sambutan yang cukup baik terbukti dengan dibukanya cabang Taman Siswa yang mencapai 58 cabang di seluruh wilayah Hindia Belanda atas swadaya masyarakat.

Taman Siswa juga atas dasar semangat pergerakan nasional yang hendak diwariskan kepada putranya.¹⁶³

Setelah menyelesaikan pendidikannya selama tujuh tahun di Taman Siswa, Harjono melanjutkan ke Mu'allimin Muhammadiyah¹⁶⁴, Malang. Setelah menginjak kelas dua Mu'allimin Muhammadiyah di Malang, ayahnya memindahkan sekolah Harjono ke Mu'allimin Yogyakarta yang baru dibuka.¹⁶⁵

Selama menuntut ilmu di Yogyakarta (1938-1942) Harjono mendapatkan kesan yang cukup mendalam. Semangat persatuan dan kesatuan nasional yang dijiwai ajaran Islam tumbuh dalam diri Harjono. Hal ini disebabkan selama belajar di Yogyakarta, Harjono tinggal di asrama yang penghuninya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Selain itu, yang memberikan kesan pada Harjono selama di Mu'allimin, Yogyakarta, adalah murid-muridnya diwajibkan untuk berpidato di depan guru dan teman-temannya. Kegiatan ini mau tidak mau mengharuskan setiap murid mempersiapkan pidato sebaik mungkin dan mencari rujukan untuk memperkaya pidato yang akan disampaikan.¹⁶⁶

Setelah lulus dari Mu'allimin Yogyakarta, Harjono mengabdikan dirinya di dunia pendidikan meskipun ia berniat untuk kembali meneruskan pendidikannya. Harjono mengajar di HIS Muhammadiyah. Untuk meneruskan pendidikannya, Harjono mencoba untuk masuk ke Sekolah Menengah Tinggi (SMT), Surabaya. Harjono diterima bersekolah di SMT, bahkan ia dianggap murid yang pintar. Setelah satu tahun menuntut ilmu di SMT, Harjono berniat untuk pindah ke kelas dua asalkan mendapatkan izin dari Jakarta. Akan tetapi, Harjono tidak diizinkan pindah ke kelas dua. Setelah keluar dari SMT pun Harjono masih tetap mengajar.¹⁶⁷

Untuk menghindari permintaan orang tuanya agar menikah di umur 20 tahun, Harjono memilih pindah ke Jakarta dan mencari pekerjaan di sana. Tahun 1943, Harjono bekerja sebagai staf perpustakaan di *Gunseikanbu Soomubu*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ Mu'allimin merupakan lembaga pendidikan guru untuk mata pelajaran *Al-Islam* dan kemuhammadiyah. Mu'allimin diperuntukkan murid laki-laki, sedangkan Mu'allimat diperuntukkan murid perempuan.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm., 27-28.

¹⁶⁷ *Ibid.*

Chosashitsu (Biro Pusat Statistik). Akan tetapi, Harjono tidak kerasan bekerja di lembaga tersebut. Hal ini disebabkan oleh melaksanakan upacara *seikerei*¹⁶⁸ dan mengunjungi *chureido*¹⁶⁹ untuk memberikan penghormatan. Harjono memilih alasan melanjutkan sekolah untuk keluar dari pekerjaan tersebut.

Setelah melalui proses perenungan, Harjono memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di pondok pesantren di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Keputusan Harjono untuk melanjutkan ke pesantren mengundang kecurigaan pihak pengasuh pondok pesantren karena seorang bernama Harjono dan berkepala gundul cukup aneh untuk masuk ke pesantren. Bahkan, ia dicurigai sebagai mata-mata Jepang.¹⁷⁰ Berbekal pengalaman yang pernah dicurigai ketika pertama kali datang di Tebuireng, Harjono memutuskan untuk menambahkan Anwar sebelum kata Harjono sehingga namanya menjadi Anwar Harjono.¹⁷¹

Selain menjadi santri di Tebuireng, Harjono juga dipercaya untuk mengajar pelajaran umum, seperti Ilmu Bumi, Sejarah, dan bahasa Jepang. Hal ini dikarenakan Harjono pernah menuntut ilmu di Mu'allimin Yogyakarta, bahkan Harjono pernah menjadi penerjemah *Syuchokan* (Residen) Surabaya yang mengunjungi Tebuireng.¹⁷²

Pada tahun 1945, didirikan perguruan tinggi Islam yang diberi nama Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta. Berita mengenai didirikannya STI terdengar oleh Harjono yang telah menjadi santri selama satu tahun di Tebuireng. Harjono pun menuntut ilmu di STI di Jakarta karena niat ayahnya dulu untuk menyekolahkan di Perguruan Luhur di Surakarta tidak dapat dilaksanakan karena perguruan tersebut telah ditutup.¹⁷³

Pada masa revolusi kemerdekaan Harjono mengambil peranan dalam rapat di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Harjono berperan untuk memobilisasi rakyat dalam rapat raksasa tersebut.¹⁷⁴

¹⁶⁸ *Seikerei* merupakan upacara menghormati Tenno yang dianggap sebagai Putera Dewa Matahari dengan cara membungkukkan badan sebagaimana rukuk dalam shalat ke arah timur laut.

¹⁶⁹ *Chureido* merupakan tempat penyimpanan abu prajurit Jepang.

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm., 36-37.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm., 41.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*, hlm., 45.

¹⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 59-69.

Selain berperan dalam rapat di lapangan Ikada, Harjono pun turut serta dalam pembentukan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). GPII dibentuk pada 2 Oktober 1945 yang bertujuan untuk (1) mempertahankan Negara Republik Indonesia dan (2) menyiarkan agama Islam. Dalam organisasi ini Harjono menjabat sebagai Sekretaris Umum. Harjono juga dipercayakan untuk membentuk GPII di Jakarta.¹⁷⁵

Pada 15—21 Maret 1950, dalam kongres keempat GPII Harjono diangkat sebagai Wakil Ketua Umum I. Akan tetapi, empat bulan kemudian Harjono diangkat sebagai Ketua Umum GPII menggantikan R. H. Benjamin karena meninggal dunia. Sebagai Ketua Umum GPII Harjono menghadiri Kongres Umat Islam Sedunia (*Muktamar Alam Islami*) yang diadakan pada Februari 1951 di Karachi, Pakistan. Harjono menjabat sebagai Ketua Umum GPII sampai tahun 1956. Harjono menolak kembali dicalonkan sebagai Ketua Umum dalam kongres kedelapan GPII yang dilaksanakan pada 1956.¹⁷⁶

Dalam lapangan politik, Harjono pun mengambil peranan dengan terpilih sebagai anggota Dewan Perjuangan Pimpinan Pusat Masyumi tahun 1946.¹⁷⁷ Dalam pemilihan umum pertama tahun 1955, Harjono terpilih sebagai anggota DPR mewakili partai Masyumi. Sebelum terpilih menjadi anggota DPR, Harjono ditunjuk sebagai anggota DPRS.¹⁷⁸

Dalam pemerintahan, Harjono bekerja di Bagian Politik Kementerian Dalam Negeri (1948-1950) dan juga bekerja pada Bagian Politik/Aliran Agama di Kementerian Agama (1950-1953). Sebelum terpilih menjadi anggota DPR, Harjono dipercayakan sebagai staf Sekretaris Jendral Kementerian Agama. Dengan pengalaman yang mumpuni dalam pemerintahan, Harjono dipercayakan partainya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Masyumi di DPR.¹⁷⁹

Masa Demokrasi Terpimpin, Harjono ikut andil dalam pembentukan Liga Demokrasi.¹⁸⁰ Salah satu alasan pembentukan Liga Demokrasi disebabkan

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 128-141.

¹⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 101.

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm., 160.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ Liga Demokrasi dibentuk pada 24 Maret 1960 oleh 15 tokoh dari berbagai partai, yaitu I. J. Kasimo (Partai Katolik), Faqih Usman (Masyumi), A. M. Tambunan (Parkindo), Sugirman (IPKI), Hamara Effendy (IPKI), Soebadio Sastroto (PSI), K.H. M. Dahlan, Hamid Alqadrie (PSI),

diikutsertakannya Ketua Umum PNI, NU, dan PKI ke Tampaksiring oleh Presiden dengan maksud untuk membicarakan susunan anggota DPR-GR tanpa melibatkan tokoh-tokoh Masyumi dan PSI.¹⁸¹ Liga Demokrasi menginginkan DPR dibentuk secara demokratis dan konstitusional. Akan tetapi, keinginan Liga Demokrasi unruk menegakkan demokrasi kandas. Hal ini disebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.8 tahun 1961 tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi. Liga Demokrasi dikategorikan asas dan tujuannya tidak sesuai dengan Manifesto Publik yang telah menjadi GBHN.¹⁸²

Pada 17 Agustus 1960, melalui Kepres No. 200 tahun 1960 Presiden Soekarno memerintahkan pembubaran Masyumi karena tidak mampu membuktikan ketidakterlibatannya dalam PRRI-Permesta. Saat Masyumi membubarkan dirinya, Harjono duduk sebagai anggota Pengurus Pusat Masyumi. Saat terjadi penangkapan terhadap tokoh-tokoh Masyumi, Harjono juga sempat ditahan selama 2,5 bulan. Harjono dipenjarakan di Rumah Tahanan Militer (RTM), Jalan Keagungan, Jakarta. Setelah 2,5 bulan dipenjarakan status Harjono diganti menjadi tahanan kota sampai masa Demokrasi Terpimpinberakhir.¹⁸³

Selain berkisah dalam bidang politik dan pemerintahan Harjono pun memusatkan perhatiannya untuk melanjutkan pendidikannya dalam bidang hukum. Harjono menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Hukum Islam, Keleluasan dan Keadilannya* pada 22 Januari 1968.¹⁸⁴

Pada tahun 1966, gagasan merehabilitasi Masyumi muncul di kalangan tokoh-tokoh Masyumi yang baru dibebaskan dari tahanan pada masa Demokrasi Terpimpin. Tokoh-tokoh Masyumi mengajukan rehabilitasi Masyumi sebagai alat perjuangan. Harjono mengatakan bahwa tugas penting yang harus dilaksanakan umat Islam dan bangsa Indonesia umumnya setelah tumbanganya Demokrasi Terpinpindigantikan Orde Baru ialah memulihkan hak-hak asasi warga negara untuk berserikat dan berkumpul.¹⁸⁵ Pada akhirnya, usaha untuk merehabilitasi

Imron Rosyadi (Ketua Umum GP Anshor), Dachlan Ibrahim (IPKI), Anwar Harjono (Masyumi), J. R. Koot (Parkindo), M. Roem (Masyumi), J. C. Princen (IPKI), Ir. Abdul Kadir (IPKI).

¹⁸¹ S. U. Bajasut (peny.), *op. cit.*, hlm. 121-123.

¹⁸² *Ibid.*, hlm., 202.

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 213-214.

¹⁸⁴ *Ibid.*,

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm., 223.

Masyumi mengalami kegagalan karena Masyumi disamakan dengan PKI yang bermaksud untuk menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945.

Pada masa Orde Baru, Harjono tidak terjun dalam bidang politik tetapi lebih memilih bidang dakwah, hukum, dan ilmiah sebagai sarana pengabdian ke masyarakat. Dalam bidang hukum, Harjono mendirikan Lembaga Pembela Hak-hak Asasi Manusia pada 29 April 1966. Pada 1970-1973 Harjono menjabat sebagai anggota pengurus Dewan Kehormatan Persatuan Advokat Indonesia, anggota Dewan Penyantun Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Yayasan Lembaga Keadilan Hukum sejak 1979 duduk sebagai Wakil Ketua sekaligus sebagai direktur. Kemudian di bidang pendidikan sejak tahun 1967 sampai tahun 1980, Harjono berprofesi sebagai dosen Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah. Kemudian Harjono juga mengajar di Universitas Ibnu Chaldun. Sedangkan dalam bidang dakwah Harjono aktif di DDII, lalu sebagai anggota pengurus Yayasan Pembangunan Umat sejak tahun 1956. Dalam bidang ilmiah, sejak 1970-1983 Harjono tercatat sebagai anggota *Board of Directors World Conference on Religion and Peace* yang berpusat di New York, Amerika Serikat serta menjadi direktur Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LIPPM). Sejak tahun 1983, Harjono secara rutin mengisi rubrik "Assalamualaikum" dalam *Serial Media Dakwah*.¹⁸⁶

Tahun 1968, Harjono menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Hukum Islam Keleluasan dan Keadilannya*. Penyusunan disertasi Harjono ini berdasarkan pada pemikiran bahwa menurutnya hukum Islam erat sekali hubungannya dengan masyarakat. Harjono berpendapat bahwa ajaran Islam bersifat universal dan abadi.¹⁸⁷

Dalam disertasinya tersebut Harjono mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan eratnya hukum Islam dengan masyarakat. *Pertama*, hukum Islam bersifat universal dan mengandung unsur-unsur yang cukup teguh dan tangguh untuk menghadapi setiap perkembangan kemajuan zaman dan diterapkan pada setiap tempat. *Kedua*, untuk menemukan kembali kekayaan pemikiran itu, kewajiban berijtihad harus diteruskan oleh setiap generasi. Kewajiban berijtihad dapat dilakukan secara perseorangan atau secara bersama-sama dalam suatu

¹⁸⁶ *Ibid.*, hlm., 242-245.

¹⁸⁷ *Ibid.*, hlm., 251-255.

majelis yang diakui sahnya oleh rakyat. *Ketiga*, berkaitan dengan ijtihad seharusnya diperlukan kejernihan berpikir dan ketajaman analisa, keluasan dada dan toleransi adalah mutlak diperlukan dalam melakukan ijtihad. *Keempat*, hukum ialah sesuatu yang menyangkut kesadaran tentang rasa keadilan yang paling tinggi dalam diri tiap-tiap manusia. Rasa keadilan yang memancar dari ajaran hukum Islam itu merupakan kesadaran paling tinggi yang hidup pada jiwa setiap muslim. Oleh karena itu hukum Islam pada dasarnya adalah non-teritorial. *Kelima*, berdasarkan fakta bahwa umat Islam Indonesia merupakan kalangan mayoritas maka diperlukan hukum positif yang bersumber pada ajaran-ajaran Islam.¹⁸⁸

III. 3 Sikap DDII Terhadap Penerbitan Buku-buku PMP

Pemerintah mendorong adanya keseragaman ideologi dengan adanya indoktrinasi wajib mengenai ideologi Pancasila bagi semua warga negara. Indoktrinasi ini berdasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Dalam ketetapan tersebut disebutkan bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap Warga Negara Indonesia.¹⁸⁹

Penerapan P4 dilakukan dengan cara memberikan kursus penataran P4 yang dilakukan di departemen-departemen pemerintahan, tempat-tempat kerja, sekolah, dan tempat-tempat lainnya. Tokoh utama yang merancang program ini adalah Roeslan Abdulgani yang sebelumnya merupakan pendukung Demokrasi Terpimpin.¹⁹⁰

Selain kursus penataran P4, di perguruan tinggi pun mahasiswanya mendapatkan ceramah P4. Ceramah P4 dimulai sejak tahun 1983, diperkenalkan dalam kegiatan Program Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK). Dengan adanya OSPEK dan penataran P4 mahasiswa dibebaskan dari mata kuliah Pancasila

¹⁸⁸ *Ibid.*,

¹⁸⁹ *Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1978. Departemen Penerangan R. I. Hlm., 49-59.*

¹⁹⁰ M. C. Ricklefs. *op. cit.*, hlm. 604.

dalam rangka Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU), karena dianggap telah mengikuti perkuliahan setara 2 SKS.¹⁹¹

Berbeda dengan di perguruan tinggi, penerapan Pancasila di tingkat sekolah melalui kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983 dilakukan melalui PMP serta Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Selain itu, peningkatan Pancasila dapat melalui *Pancasila-in action*, yaitu menegakkan tata pergaulan dan tata karma yang didasarkan atas kekeluargaan serta bernafaskan keselarasan dan kesinambungan dalam lingkungan sekolah dan kampus.¹⁹²

Pelaksanaan P4 pada tingkat perguruan tinggi dan sekolah seperti dijelaskan sebelumnya merupakan penerapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam bidang pendidikan, yaitu¹⁹³:

1. Dalam rangka melaksanakan pendidikan nasional perlu diperluas dan ditingkatkan usaha-usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pendidikan mengembangkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat.

Pada Oktober 1980, buku resmi PMP dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Sejak 1976, di sekolah-sekolah sudah diajarkan PMP tetapi dengan rekomendasi kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku yang diedarkan tahun 1980 terdiri dari 12 jilid, 6 jilid untuk SD, 3 jilid untuk SLP, dan 3 jilid untuk SLA.

Penyusunan buku PMP ini didasarkan pada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. II/MPR/1978 serta Silabus Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975.¹⁹⁴

¹⁹¹ R. Z. Leirissa. (peny.). *Sejarah Nasional Indonesia VII: Lahir dan Berkembangnya Orde Baru*. (Jakarta, 1993). Hlm. 330.

¹⁹² *Ibid*,

¹⁹³ *Ibid*.

¹⁹⁴ H. M. Yunan Nasution, "Persepsi Golongan Islam terhadap Buku-buku Teks PMP", *Serial Media Dakwah* no. 90 Shafar 1402 H/Desember 1981. hlm., 36.

Buku tersebut disusun dengan teliti dan cermat karena dikerjakan oleh orang-orang yang kompeten. Buku PMP disusun oleh tim yang terdiri dari pengarah dan penyusun. Pengarah terdiri dari 5 orang, yaitu; Prof. Darji Darmowihardjo, Prof. Dr. Setiadi MA, Brigjen Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar, dan Prof. Subijono Tjitrowinoto SH. Sedangkan, penyusun terdiri dari 12 orang, yaitu; Sofyan Aman, Marthias J. Daeli, M. Noor Syam, A. Gunawan Setiardja, Nyoman Dekker, Kasmiran Wurjo, Krissantono, Iman Soedarwo, C. S. T. Kansil, Suprpto, Sujono, Fuad M. Salim.¹⁹⁵

Buku PMP yang diedarkan telah melalui enam tahap pembahasan sebelum akhirnya diedarkan. *Pertama*, suatu kelompok Penasehat atau Pengarah mengadakan pertukaran pikiran atas saran-saran tentang bagaimana sebaiknya buku tersebut disusun sehingga, tujuan bidang studi dapat dicapai. *Kedua*, kelompok penulis terdiri dari para dosen dan guru-guru yang telah berpengalaman, menyusun kerangka tulisan yang kemudian melaksanakan penulisan tersebut. *Ketiga*, kelompok penilai yang terdiri dari beberapa tenaga dosen dari Universitas dan guru-guru lapangan, menilai karya dari para penulis tersebut, dan memberikan saran-saran perbaikan. *Keempat*, kelompok editor kemudian menyempurnakan lebih lanjut susunan tulisan agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari bidang studi tersebut. *Kelima*, konsep penulisan ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Penerangan, Ketua Penasehat Presiden dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketua Bidang Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, untuk mendapatkan tanggapan-tanggapan yang diharapkan. *Keenam*, konsep tersebut diteliti oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Darji Darmowihardjo, SH. Terakhir, sebelum penyempurnaan bahasa dilakukan oleh kelompok tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, semua naskah diperiksa oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.¹⁹⁶

Pada 13 Juni 1981, dalam sidang pleno DPR Fraksi Persatuan Pembangunan mengeluarkan pendapat, bahwa semua buku pelajaran Pendidikan Moral Pancasila baik untuk SD, SLP, maupun SLA terutama yang diterbitkan oleh Departemen

¹⁹⁵ Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Pendidikan Moral Pancasila*, (Jakarta, 1982).

¹⁹⁶ *Ibid.*,

P dan K perlu ditinjau kembali.¹⁹⁷ Mengenai penolakan FPP akan buku-buku PMP akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Penolakan DDII terhadap isi buku PMP disampaikan melalui artikel-artikel yang diterbitkan oleh *Media Dakwah*. Artikel-artikel mengenai penolakan atas isi buku-buku PMP ditulis oleh M. Natsir selaku Ketua DDII. Selain termuat dalam *Media Dakwah*, tulisan Natsir mengenai penolakan isi buku-buku PMP juga tersebar dalam majalah-majalah Islam lainnya, seperti *Panji Masyarakat*, *Al-Muslimun*.

Beberapa bagian dari buku PMP yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam menurut DDII tercantum dalam *Serial Media Dakwah*. Hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tersebut diajarkan kepada murid-murid adalah sebagai berikut:¹⁹⁸

PMP SD Kelas V Hlm., 12-13.

“Kerukunan beragama dapat dicapai antara lain dengan jalan sebagai berikut:

a. Saling menghormati hari raya agama masing-masing. Misalnya pada hari raya Idul Fitri sebaiknya masyarakat yang tidak memperingati hari raya itu berkunjung atau mengirimkan kartu lebaran kepada saudara-saudaranya yang merayakan, dengan mengucapkan Selamat hari raya Idul Fitri dan saling memaafkan. Sebaliknya, demikian juga pada hari Natal. Masyarakat yang tidak merayakan hari Natal berbuat seperti itu. Demikian juga pada hari raya lain.

b. Pada waktu ada kematian. Kita juga mungkin akan menemui upacara keagamaan yang berbeda dengan cara yang ada pada agama kita. Kita juga tidak boleh berbuat yang dapat menyinggung rasa keagamaan yang bersangkutan. Yang harus diingat adalah kita datang pada upacara kematian itu dengan tujuan memberikan penghormatan terakhir kepada yang meninggal, dan ikut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk beragama wajib berdoa semoga yang meninggal diampuni dan diterima Tuhan Yang Maha Esa, dan yang ditinggalkan diberinya kekuatan lahir dan batin.”

¹⁹⁷ Mohamad Roem, “Buku Pendidikan Moral Pancasila Ditinjau Kembali”, *Serial Media Dakwah* no. 93 Jumadil Awal 1402 H/Maret 1982. hlm. 1.

¹⁹⁸ “Buku PMP yang Meresahkan: Upaya Pendangkalan Agama yang Mendasar.” *Serial Media Dakwah* no.90 Shafar 1402 H/Desember 1981. hlm. 33-34.

PMP SD Kelas VI hlm. 12.

“Semua agama mengharuskan kita mencintai sesama manusia, mengharuskan kita berbuat benar menurut hukum Tuhan, mengharuskan berbakti kepada-Nya. Sebagai pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa kita harus bersatu, rukun, bergotong-royong, tolong-menolong sesama kawan. Kita tidak boleh memilih kawan berdasarkan keagamaan semata.”

Hlm. 13.

1. Kita wajib memberikan ucapan selamat hari raya kepada pemeluk agama yang merayakan.
2. Pada waktu ada upacara kemasyarakatan misalnya kematian, pernikahan, peribadatan, kita saling menghormati dan mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

PMP SLP Kelas I hlm.12.

“Keberangkatan mereka ke Jakarta itu menempuh jarak yang bermacam-macam. Ada yang naik pesawat udara, ada yang naik kapal laut, ada yang naik kereta api, ada yang naik bus, dan sebagainya. Mereka menempuh jalan yang berbeda, tetapi tujuannya sama.

Demikian juga, pemeluk-pemeluk agama itu. Walaupun agamanya lain tetapi tujuannya sama, yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

PMP SLP Kelas II hlm. 78.

“Tuhan yang berada di mana saja. Juga dalam tempat yang kosong ini. Tuhan melihat aku mencuri uang itu. Aku tahu, pasti Tuhan akan menolongku berada dalam jalan Tuhan.”

PMP SLP Kelas III hlm.9

“Kerukunan hidup dan kerja sama saling membantu antara masyarakat yang berbeda-beda agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu terdapat dalam lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat. Kerja sama dan gotong royong dalam penyelenggaraan upacara, perkawinan, pemakaman, dan selamatan desa, atau pembuatan rumah, jalan dan jembatan, pembuatan balai desa, tempat pendidikan dan peribadatan. “

PMP SLA Kelas I hlm.9

“Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian besar beragama Islam. Disamping itu, penduduk ada yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu,

Budha, serta penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

PMP SLA Kelas II hlm.5

“Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan toleransi beragama, kita masing-masing harus menghindari dan menjauhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sikap fanatik yang berlebih-lebihan ialah sikap yang tidak mau menghargai pemeluk agama lain dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bahkan memusuhinya. Kita harus mempunyai keyakinan akan kebenaran, agama tidak boleh membuat kita sempit dalam pandangan dan sikap terhadap keyakinan orang yang memeluk agama lain.
- b. Sikap mencampuradukkan ajaran agama atau kepercayaan kita dengan ajaran atau kepercayaan lain. Toleransi beragama tidak berarti mencampuradukkan ajaran agama; kemurnian ajaran agama harus tetap dijaga.
- c. Sikap acuh tak acuh terhadap agama atau kepercayaan lain, seakan-akan hanya ada satu agama yang paling benar.”

Menurut Natsir selaku Ketua DDII, yang di ajarkan dalam buku PMP tingkat SLA kelas II halaman 5 yang mengatakan, “sikap acuh tak acuh terhadap agama atau kepercayaan lain, seakan-akan hanya ada satu agama yang paling benar,” secara tidak langsung kalimat tersebut mengandung makna bahwa agama yang selama ini dianut bukanlah satu-satunya agama yang benar. Selain itu, masing-masing pemeluk agama pasti akan meyakini bahwa agamanya paling benar. Menurutnya, pengarang-pengarang buku-buku tersebut hendak mengkonfrontasikan Pancasila dengan agama yang masing-masing pemeluknya meyakini bahwa agamanyalah yang paling benar. Hal ini juga dianggap mendiskreditkan Pancasila.¹⁹⁹

Beberapa bagian yang dikutip dalam *Serial Media Dakwah* yang diterbitkan oleh DDII memberikan alasan kuat bagi pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan Islam untuk mengadakan pertemuan pada 12 Oktober 1981 di Perguruan As-Syafiiyah, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam, seperti Mohammad Natsir, K. H. Soleh Iskandar (Ketua Badan Kerjasama Pondok Pesantren Jawa Barat), K. H. Abdullah Syafi’i, K. H. Abdullah Salim, juga dihadiri anggota DPR, yaitu Teuku Mohammad Saleh, Mohammad

¹⁹⁹ M. Natsir. *loc. cit.*, “Jangan...” hlm., 5-6.

Sulaiman, dan Khalik Ali. Kesimpulan dari pertemuan itu menyatakan bahwa buku PMP merupakan mata rantai dari pendangkalan agama.²⁰⁰

Mohammad Natsir juga mengeluarkan pendapat mengenai isi dari buku PMP untuk tingkat SD, SLP, dan SLA. Menurut Natsir, dalam buku PMP terdapat unsur-unsur pendangkalan agama, menyamakan semua agama, dan unsur-unsur yang mempertentangkan Pancasila dengan Agama.²⁰¹ Selain itu, Natsir juga menulis :

“selain daripada itu, apabila diteliti lagi cara-cara yang digunakan untuk men-introdusir ide-ide dari para pengarang buku tersebut, sebagai “Moral Pancasila” itu, sebenarnya dengan sadar atau tidak mengkonfrontasikan Pancasila dengan agama. Bukan saja dengan agama Islam, tapi juga dengan agama-agama samawi lainnya.”²⁰²

Natsir menganggap pengajaran PMP bagi siswa SD, SMP, dan SMA seolah-olah di Indonesia sedang menghadapi fanatisme agama seperti yang berkejolak di Irlandia, atau di India dan Libanon yang setiap waktu fanatisme itu dapat meletus. Menurutnya, umat Islam yang menjadi kalangan mayoritas di Indonesia telah memiliki petunjuk yang jelas termasuk mengatur hubungan antara pemeluk agama lainnya. Umat Islam tidak akan keberatan ketika diajarkan untuk jangan fanatik dan harus toleran.

“Demikian rupa, seolah-olah kita sedang menghadapi bahaya fanatisme agama yang berkejolak seperti di Irlandia, dan yang setiap waktu meletus seperti di India, dan di Libanon, dengan segala akibat-akibatnya yang menyedihkan itu.

Sedangkan umat Islam, yang merupakan mayoritas di negeri ini, sudah memiliki Agama mereka sendiri petunjuk-petunjuk yang tegas, bagaimana memelihara modus vivendi, yaitu tata cara hidup berdampingan dengan rukun, antara pemeluk-pemeluk bermacam agama.

Maka, apabila diajarkan kepada murid SLA agar jangan fanatik dan harus toleran terhadap penganut agama lain, tentulah tidak ada yang keberatan.²⁰³

Dalam buku PMP tingkat SLA kelas II terdapat kalimat yang berbunyi “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai anugerah Tuhan berdasarkan kodrat manusia, bukan pemberian negara, masyarakat atau

²⁰⁰ *loc. cit.*, hlm., 34.

²⁰¹ Mohammad Natsir “Jangan Meng-Agamakan Pancasila ...” *loc. cit.*, hlm., 5.

²⁰² *Ibid.*,

²⁰³ *Ibid.*,

golongan.” Kalimat ini dianggap bermasalah oleh Natsir, karena dalam kalimat tersebut seolah-olah menyamakan kedudukan wahyu dengan Pancasila. Dalam sebuah tulisan Natsir menulis:

“Apakah dengan ini dimaksud, supaya anak didik percaya bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang diusulkan pemerintah dan disahkan MPR tahun 1978 lebih tinggi nilainya daripada Undang-Undang Negara, di-“sakral”-kan seperti wahyu Tuhan Yang Maha Esa.”²⁰⁴

Dalam buku PMP tingkat SLA kelas 1 halaman 5 diajarkan bahwa dengan akal fikiran dan bahasa, manusia dapat mengenal sifat-sifat Tuhan, bahkan Zat Tuhan. Pernyataan dalam buku tersebut dianggap Natsir bertentangan dengan akidah Islam, karena manusia memang diperintahkan untuk memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah SWT, tetapi manusia dilarang untuk memikirkan zat Tuhan. Menurut Natsir, jika manusia memikirkan zat Tuhan tidak akan tercapai oleh akal manusia. Memikirkan zat Tuhan justru akan membawa pada kesesatan-kesesatan, seperti; syirik, pantheisme, dan lain-lain.²⁰⁵

Penolakan Natsir terhadap isi buku PMP juga cukup keras ketika PMP tingkat SD menerima adanya penganut keyakinan atau aliran kebatinan. Dalam buku PMP tingkat SD kelas III terdapat dialog antara ayah dan anaknya yang berisi, Dalam buku PMP tingkat SD kelas III hlm. 7 tercantum percakapan sebagai berikut;

“Hasan bertanya kepada ayahnya, “Pak, apakah Pak Sudiro beragama Kristen? “Tidak”, jawab ayahnya. “Mungkin dia beragama Hindu atau Budha barangkali.” “Juga tidak” sahut ayahnya.” Baiklah. Dan inilah ceritera ayah Hasan. Pak Sudiro adalah penganut kepercayaan kepada Tuhan YME. Dia mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyembah Tuhan. Dia juga selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Dia juga percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih lagi Penyayang.”

Natsir memberikan pandangannya mengenai aliran kepercayaan yang tercantum dalam buku PMP, yaitu:

“Apabila anak didik di kelas III SD yang berusia 8 atau 9 tahun itu membaca ini, maka yang tertanamkan dalam jiwanya, ialah boleh juga kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan cara beribadah kepadanya terserah kepada kita sendiri atau menurut tradisi nenek moyang kita,

²⁰⁴ *Ibid.*,

²⁰⁵ *Ibid.*,

seperti “Pak Sudiro itu” yang simpati, dan “juga selalu berbuat kebaikan...”²⁰⁶

Natsir mempermasalahkan aliran kepercayaan yang coba ditanamkan kepada anak didik yang beragama Islam, Katholik, Protestan atas nama Moral Pancasila justru akan menjadikan Pancasila sebagai alat yang dipergunakan untuk menyebarkan aliran kebatinan dan dipertentangkan frontal dengan agama-agama samawi.²⁰⁷

Natsir juga memberikan himbauan dalam *Panji Masyarakat*. Dalam tulisannya ini Natsir menghimbau kepada pihak-pihak yang terkait dengan pengajaran PMP di sekolah-sekolah untuk menyelamatkan dan melindungi akidah dan tauhid anak-anak sekolah yang mendapatkan pelajaran PMP. Natsir juga mempertanyakan hendak kemana anak didik dibawa oleh PMP.²⁰⁸

Kalangan Islam menilai banyak bagian dari buku PMP yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam sehingga perlu perbaikan secara mendasar dan menyeluruh. Sebagai upaya melakukan perbaikan tersebut, maka tanggal 23 Agustus 1982 tokoh-tokoh Islam menemui pimpinan DPR/MPR RI untuk mengupayakan perbaikan secara menyeluruh atas buku tersebut.

Natsir sebagai salah satu tokoh Islam yang menghadap pimpinan DPR/MPR RI juga menyampaikan pandangannya. Sebagai orang yang mengikuti perkembangan penyusunan UUD, Natsir tidak pernah mendengar bahwa Pancasila itu sebagai sumber moral. Menurutnya moral dalam definisi agama-agama samawi sangat tinggi maknanya, moral tidak pernah bersumber dari fikiran dan akal manusia semata.

Natsir mengutip pendapat MAWI (Majelis Agung Waligereja Indonesia) sebagai wakil dari umat Katolik yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai *statement* politik, bukan *statement* teologi. Oleh karena itu Pancasila jangan mencampuri urusan yang tidak langsung berada di dalam wewenang negara.

Natsir juga menyertakan pendapat DGI sebagai wakil dari umat Protestan. Dalam Konferensi Nasional Gereja dan Masyarakat di Salatiga tahun 1967

²⁰⁶ *Ibid.*,

²⁰⁷ *Ibid.*,

²⁰⁸ “Moh. Natsir menghimbau” *Panji Masyarakat* no. 350 17 Rabiul Akhir 1402-11 Februari 1982 Tahun XXIII. Hlm. 12.

mengenai ketetapan MPRS No. 10/MPRS/1966 yang berbunyi Pancasila sebagai sumber daripada segala sumber hukum. Ketetapan MPRS ditentang oleh DGI, karena menurut ajaran Protestan yang menjadi sumber segala sumber hukum adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran Protestan menerima Pancasila sebagai sumber dari hukum Indonesia bukan merupakan sumber dari segala sumber hukum.²⁰⁹

Sedangkan bagi umat Islam sumber dari segala sumber hukum adalah Al-Qur'an dan Hadist bukan yang lain. Kelima sila dalam Pancasila tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Natsir mengistilahkan "Pancasila akan hidup subur sekali dalam pangkuan ajaran Islam."²¹⁰

Jika Pancasila dikaitkan dengan paham-paham yang bertentangan dengan Islam bahkan dengan agama-agama samawi lainnya maka Pancasila akan bertentangan dengan agama-agama samawi tersebut. Jika hal tersebut terjadi, Pancasila tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai pemersatu bangsa atau mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Natsir menyatakan bila hal itu terjadi justru Pancasila akan menjadi sumber pertengkarannya terus menerus.

Natsir menyatakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjustifikasikan Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 untuk memasukkan nilai-nilai sinkretisme ke dalam buku PMP atas nama Moral Pancasila.

Natsir juga menyayangkan pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa pihak yang tidak menerima buku PMP dikatakan sebagai anti-Pancasila. Hal ini dikarenakan pernyataan anti-Pancasila sering digunakan oleh sekelompok orang untuk menjatuhkan pihak lain yang berbeda paham.

Permasalahan buku PMP disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam kepada DPR-MPR RI karena permasalahan ini tidak hanya sekedar perbaikan teknis dalam buku tersebut, tetapi dasar pemikiran (*way of thinking*) buku tersebut. Kalangan Islam menginginkan peninjauan buku PMP secara menyeluruh dan mendasar. Kalangan Islam menginginkan dasar isi buku PMP yaitu Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 mengenai P4. P4 dikatakan bukan sebagai tafsir

²⁰⁹ "Pancasila Akan Hidup Subur Sekali dalam Pangkuan Ajaran Islam", *Al-Muslimun* no.151 Zulhijjah 1402 H/Muharam 1403 H Oktober 1982 Tahun XIII. Lembaran Khusus hlm. 1-4.

²¹⁰ *Ibid.*,

Pancasila, tetapi dalam buku “Penjelasan Ringkas Tentang Moral Pancasila” Pancasila diberikan tugas sebagai pandangan hidup, kesadaran bangsa, cita-cita moral bangsa, watak bangsa. Menurut Natsir tidak ada orang yang berhak untuk menafsirkan Pancasila apalagi Pancasila diberikan tugas-tugas berat seperti di atas. Natsir juga mempertanyakan ruang agama dalam kehidupan seseorang jika itu semua telah digantikan oleh Pancasila. Bisa jadi tidak ada ruang dalam kehidupan ruhani bangsa Indonesia karena telah digantikan oleh Pancasila.

Natsir sebagai salah satu wakil dari tokoh-tokoh Islam yang menyampaikan aspirasinya di depan anggota DPR-MPR RI menyampaikan empat solusi atas permasalahan buku PMP.²¹¹ *Pertama*, buku PMP yang diterbitkan tahun 1980 tidak dipakai di sekolah-sekolah, diganti dengan buku kewarganegaraan (*civics*). *Kedua*, buku yang baru ini tidak berisi ajaran agama, atau ajaran kepercayaan apapun. Tidak menafsirkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak menafsirkan ajaran agama. Ajaran agama diserahkan kepada guru-guru agama di sekolah. *Ketiga*, nama buku Pendidikan Moral Pancasila tidak lagi dipergunakan tetapi dipergunakan *civics* atau Kewargaan Negara Pancasila. Jangan campur adukkan agama dan moral. *Keempat*, diharapkan DPR dan MPR sebagai lembaga legislatif tertinggi bersama-sama pemerintah bersama-sama membahas permasalahan ini secara mendasar demi keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam tulisannya M. Yunan Nasution, salah seorang tokoh DDII yang ikut dalam kajian mengenai persepsi kalangan Islam mengenai buku PMP menguraikan dua hal prinsip yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. *Pertama*, mengenai perayaan Idul Fitri dan Natal. Dalam buku PMP tingkat SLA kelas II dikemukakan bahwa perayaan Idul Fitri dan Natal yang dilakukan secara bersama-sama merupakan sebuah bentuk toleransi. Menurut Nasution, ini bukan merupakan toleransi karena dalam perayaan Idul Fitri terdapat ritual penyembahan terhadap Allah SWT. Menghadiri perayaan yang didalamnya terdapat ritual agama lain bukan merupakan toleransi ataupun bentuk kerukunan. Nasution berpendapat mengenai toleransi dapat dilakukan dengan orang yang berlainan agama sampai pada batas tertentu, serta tidak menyangkut nilai-nilai akidah. Umat Islam yang menghadiri Natal pun tidak akan dikatakan tidak toleran,

²¹¹ *Ibid.*,

namun jika umat Islam menghadiri perayaan Natal justru dikatakan bertentangan dengan pokok ajaran Islam.²¹²

Kedua, dalam buku PMP tingkat SD kelas V terdapat kalimat yang menyatakan seseorang sebaiknya mendoakan orang yang meninggal meskipun berlainan agama. Nasution menganggap boleh saja mengunjungi perkawinan, menjenguk orang sakit, kematian yang berlainan agama. Menurutnya hal tersebut merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang sebaiknya dijaga. Akan tetapi tidak sampai mendoakan orang yang sakit ataupun meninggal. Menurutnya, mendoakan termasuk kategori ritual, dasar-dasar akidah. Nasution menguatkan argumentasinya dengan memberikan contoh kasus Nabi Muhammad mendoakan pamannya Abu Thalib yang musyrik sampai meninggalnya.²¹³ Pada saat itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang tertera dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 113 yang berbunyi:

*“Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dari orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik itu adalah kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah penghuni neraka jahannam.”*²¹⁴

M. Yunan Nasution memberikan saran-saran untuk perbaikan menyeluruh. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:²¹⁵

1. Supaya bagian-bagian yang bertentangan dengan ajaran Islam itu di angkat (dicoret) dari buku PMP itu.
2. Untuk menghindari kekosongan (vakum) maka buku PMP yang sudah diangkat bagian-bagian yang bertentangan dengan ajaran Islam itu, dapat dipakai terus di sekolah sampai ada gantinya yang diterapkan oleh satu peraturan atau perundang-undangan.
3. Melihat kenyataan bahwa isi teks buku PMP yang 12 jilid itu bukan hanya mengenai masalah moral Pancasila saja, tapi bercampur-baur dengan pengetahuan-pengetahuan *elementair* yang masuk dalam bidang *civic*,

²¹² M.Yunan Nasution. “Persepsi Golongan Islam Terhadap Buku-Buku Teks PMP.” *Serial Media Dakwah*, no.90 Shafar 1402 H/Desember 1981. Hlm. 38-39.

²¹³ *Loc. cit.*,

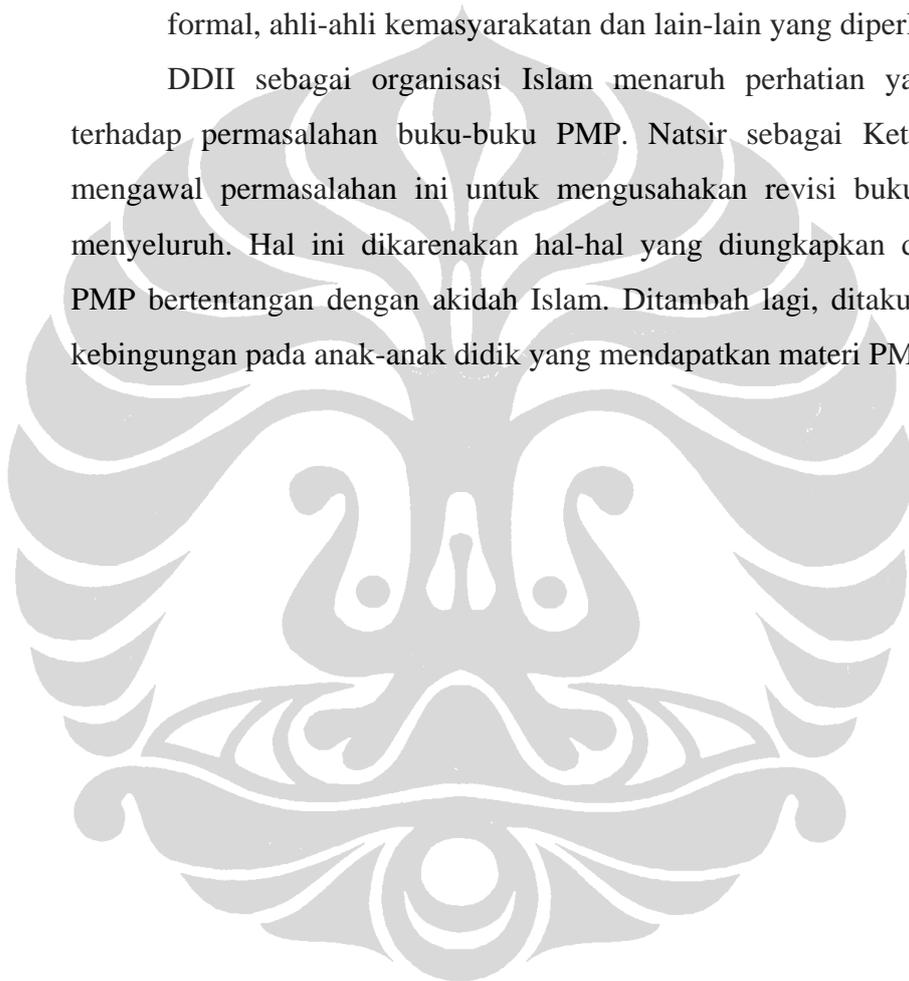
²¹⁴ Lihat Terjemah Al-Qur'an 9;114.

²¹⁵ *Loc. cit.*, hlm., 40-41.

Sejarah, Geografik dan lain-lain yang diperlukan bagi anak didik, maka seyogyanyalah soal-soal yang dipandang erat hubungannya dengan masalah Moral Pancasila, disusun secara terpisah (*apart*).

4. Untuk menyusun apa-apa yang menjadi isi dan materi Moral Pancasila itu dibentuk Panitia Negara yang terdiri dari unsur-unsur beberapa Departemen yang ada kaitannya dengan soal pendidikan, agama, ditambah dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh dan ahli-ahli pendidikan non-formal, ahli-ahli kemasyarakatan dan lain-lain yang diperlukan.

DDII sebagai organisasi Islam menaruh perhatian yang begitu besar terhadap permasalahan buku-buku PMP. Natsir sebagai Ketua Umum DDII mengawal permasalahan ini untuk mengusahakan revisi buku tersebut secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan hal-hal yang diungkapkan dalam buku-buku PMP bertentangan dengan akidah Islam. Ditambah lagi, ditakutkan akan terjadi kebingungan pada anak-anak didik yang mendapatkan materi PMP tersebut.



BAB IV

Tanggapan Terhadap Penolakan yang Dilakukan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia

IV. 1 Tanggapan dari Lembaga Pendidikan Islam Jakarta

Tanggapan mengenai buku-buku PMP yang dianggap merusak akidah Islam juga datang dari lembaga pendidikan Islam se-Jakarta. Tanggapan yang mereka lakukan berupa kajian komprehensif yang menunjukkan bagian buku-buku PMP yang dianggap meresahkan umat Islam juga mencantumkan ayat Al-Qur'an sebagai sanggahan terhadap isi buku-buku PMP tersebut. Diantaranya hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islam akan dipaparkan di bawah ini.

Lembaga pendidikan Islam Jakarta mempermasalahkan redaksional yang termuat dalam buku PMP untuk tingkat SD kelas I halaman 20 yang berbunyi "hari besar setiap agama itu berbeda. Sembahyang pun berbeda tetapi tujuannya sama."

Pernyataan yang tertulis dalam buku tersebut menimbulkan masalah bagi kalangan Islam karena menurut kalangan Islam, Islamlah satu-satunya agama yang benar. Pernyataan ini dibantah oleh kalangan Islam dengan mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu: Surat Ali-Imran ayat 18 yang berbunyi

*"Sesungguhnya agama (yang diridhoi) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya."*²¹⁶

Dalam buku PMP tingkat SD kelas III halaman 7 terdapat dialog antara ayah dan anaknya sebagai berikut

"Hasan bertanya kepada ayahnya, "Pak, apakah Pak Sudiro beragama Kristen? "Tidak", jawab ayahnya. "Mungkin dia beragama Hindu atau Budha barangkali." "Juga tidak" sahut ayahnya." Baiklah. Dan inilah ceritera ayah Hasan. Pak Sudiro adalah penganut kepercayaan kepada Tuhan YME. Dia mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyembah Tuhan. Dia juga selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Dia juga percaya

²¹⁶ "Hasil Penelitian Lembaga Pendidikan Islam Jakarta Raya Dalam Buku Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila Terbitan Departemen P & K (PN Balai Pustaka)." *Serial Media Dakwah*, no.90 Shafar 1402 H/Desember 1981. Hlm. 8-15.

bahwa Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Pengasih lagi Penyayang.

Dialog tersebut memaparkan mengenai adanya aliran kepercayaan atau aliran kebatinan yang secara tidak langsung disejajarkan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Dialog tersebut dianggap akan membingungkan anak-anak dan sebagai sarana untuk menyebarkan aliran kebatinan. Dialog ini juga ditakutkan akan membuat anak-anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi cara beribadahnya terserah menurut diri sendiri atau menurut ajaran nenek moyang.

Lembaga pendidikan Islam Jakarta membantah adanya aliran kebatinan berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat Luqman ayat 20-21

“... Sebahagian dari manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah dengan tidak mempunyai ‘ilmu atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka: Turutilah apa yang diturunkan oleh Allah, agama yang Kami dapati bapak-bapak kami pada (menganutnya). Apakah (mereka turut saja), walaupun setan mengajak mereka kepada ‘adzab mereka.”

Dalam buku PMP SD kelas III halaman 22 tertulis

“Kerukunan umat beragama tampak pada peringatan hari besar agama. Lebaran adalah hari besar Islam. Tetapi halal bihalal yang diselenggarakan di suatu Rukun Tetangga (RT) misalnya, juga dihadiri oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Orang yang beragama Islam, Hindu dan Budha juga hadir pada perayaan Natal. Hari Natal adalah hari besar Kristen Protestan dan Kristen Katolik.”

Pernyataan dalam buku PMP ini yang bertentangan dengan akidah Islam ini diajarkan kepada anak didik. Hal ini dianggap bertentangan dengan akidah karena dalam perayaan hari Natal terdapat unsur pembaktian yang sifatnya ritual menurut ajaran Kristiani. Oleh karena itu, dengan alasan toleransi dan kerukunan beragama sekalipun hal yang disebutkan dalam buku PMP tersebut tidak dapat dilakukan. Lembaga pendidikan Islam Jakarta membantah pernyataan di atas dengan menyertakan ayat Al-Qur'an Surat an-Nisa;140 yang berbunyi

“ Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya

*Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam.*²¹⁷

Penelitian secara komprehensif yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Islam Jakarta menguatkan pernyataan yang dilakukan oleh Natsir sekaligus memperjelas bagian-bagian dari buku-buku PMP yang dianggap meresahkan.

IV. 2 Tanggapan dari Parlemen

Polemik mengenai penerbitan buku-buku PMP juga terjadi diantara anggota-anggota DPR. Anggota DPR yang dipelopori oleh FPP menyarankan agar buku-buku PMP direvisi, sedangkan anggota DPR dari FKP tidak sependapat dengan FPP yang menginginkan agar buku-buku tersebut direvisi. Anggota DPR dari FKP mengatakan penyusunan buku-buku PMP sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, jadi tidak perlu dilakukan revisi.

Saat pengambilan keputusan P4 yang mendasarkan pelajaran PMP disahkan menjadi tap MPR dalam sidang pleno MPR 1978 diwarnai suasana perdebatan yang hangat. Fraksi PPP yang mewakili kalangan Islam memilih untuk *walk out* dari sidang pleno, karena wakil rakyat tersebut tidak akan menanggung konsekuensi ketika P4 dijadikan ketetapan MPR. Pengesahan P4 menjadi Ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tetap berjalan meskipun tanpa kehadiran FPP.²¹⁸

Penolakan terhadap isi buku PMP awalnya dipelopori oleh FPP yang menolak buku PMP dalam sidang pleno DPR pada 13 Juni 1981. FPP berpendapat dalam buku-buku PMP dicantumkan hal-hal yang merusak akidah dan *syari'at* agama. Oleh karena itu, buku-buku tersebut perlu untuk ditinjau kembali.²¹⁹ FPP juga menyarankan agar penyusunan buku-buku PMP tersebut harus tetap berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.²²⁰

Ada empat alasan yang menjadikan FPP meminta agar buku PMP direvisi. *Pertama*, mengenai kedudukan agama. FPP tidak menyetujui kalimat “semua agama bersifat suci karena mengajarkan kebaikan menurut perintah Tuhan (PMP

²¹⁷ *Ibid.*

²¹⁸ *Ibid.*,

²¹⁹ Mohammad Natsir “Jangan Meng-Agamakan Pancasila ...” *loc. cit*, hlm., 5.

²²⁰ *Ibid.*

untuk kelas V SD halaman 12).” Keberatan tersebut berdasarkan pada Al-Qur’an surat ‘Ali-Imran ayat 19 yang berbunyi “*Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam.*”

Kedua, mengenai menghadiri upacara peringatan hari keagamaan umat beragama lainnya. Dalam buku PMP kelas V SD halaman 13 dijelaskan mengenai bagaimana sebaiknya menghadiri upacara pernikahan yang pengantinnya berlainan agama, kemudian memberikan doa restu. Pernyataan ini ditentang FPP dengan menyertakan ayat Al-Qur’an surat Al-baqaroh ayat 42 yang berbunyi “*Janganlah mencampurbaurkan hak dengan bathil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.*”

Ketiga, mengenai larangan memilih teman berdasarkan kesamaan agama. Dalam buku PMP SD kelas VI halaman 12 terdapat kalimat “Kita tidak memilih kawan berdasarkan kesamaan agama.” Menurut Amir Hamzah anggota DPR FPP kalimat di atas kurang kata “saja” sehingga dapat menyebabkan tafsiran keliru, misalnya hanya boleh berteman hanya dengan yang berlainan agama saja.

Keempat, mengenai berdoa untuk orang/penganut agama lain yang meninggal dunia supaya diampuni dan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercantum dalam buku PMP SD kelas V halaman 13. Pernyataan ini dibantah oleh Amir Hamzah dengan mencontohkan Nabi Muhammad pernah mendoakan pamannya yang non-muslim, tetapi ditegur oleh Allah. Menurutnya, ini bukanlah sifat fanatik.²²¹

FKP tidak sependapat dengan sebagian orang yang menyatakan buku PMP meresahkan masyarakat. Menurut Ki Soeratman (anggota Komisi IX FKP) yang mengadakan pengecekan di Palangkaraya, Medan, Banda Aceh, dan Yogyakarta mengatakan tidak ada yang meresahkan masyarakat. Kelahiran P4 dulu juga tidak langsung diterima oleh semua pihak. Menurut Ki Soeratman, keresahan itu timbul justru disebabkan sikap orang tertentu yang dipublikasikan.²²² Menurut Wakil Ketua Komisi IX FKP, Dr. Bawardiman isi buku PMP diajarkan sesuai dengan rencana dan berjalan biasa. Menurutnya masalah buku PMP menjadi wewenang Departemen Pendidikan & Kebudayaan.²²³ Sejalan dengan Dr. Bawardiman, Ki

²²¹ “Buku yang Nenyinggung Umat?” *Tempo*, 13 Februari 1982 hlm. 64.

²²² *Suara Karya*, 23 Februari 1982.

²²³ *Kompas*, 13 Februari 1982.

Soeratman mengatakan buku PMP tidak bisa ditinjau dari segi agama. Tolok ukur PMP berdasarkan P4.²²⁴

Selain itu, FKP mengungkapkan alasan lainnya, sebagai berikut:

“Masyarakat Indonesia bersifat pluralistis, karenanya PMP harus diberikan secara baik dan benar, serta realistis sehingga pelaksanaannya harus benar-benar berorientasi kepada semua aspek kehidupan masyarakat pada umumnya dan keagamaan serta kebudayaan pada khususnya yang mempunyai eksistensi di Indonesia.”²²⁵

Berbeda dengan anggota DPR FKP yang menganggap buku-buku PMP tidak meresahkan, Amir Hamzah anggota DPR FPP menganggap buku ini bermasalah. Permasalahan di buku-buku PMP adalah masalah akidah. Amir Hamzah menegaskan buku-buku PMP dapat merusak akidah anak-anak.²²⁶

Mendukung pernyataan Amir Hamzah, wakil ketua FPP Tengku H. Saleh mengungkapkan buku PMP mutlak direvisi, agar isinya tidak ada lagi yang bertentangan dengan ajaran agama. Penjelasan dalam buku PMP hendaknya diformulasikan agar tidak bertentangan dengan keyakinan tiap warga negara Indonesia. Ditambah lagi penjabaran dalam buku PMP tidak bercampur dengan hal-hal yang sudah digariskan agama masing-masing.²²⁷

Sejalan dengan FPP, Ketua MUI K. H. Hasan Basri menegaskan agar dialog-dialog dalam PMP yang bertentangan dengan Islam segera diperbaiki dan diganti karena meresahkan umat Islam. Hasan Basri menilai dialog-dialog tersebut tidak hanya bertentangan dengan akidah Islam tetapi juga bertentangan dengan Pancasila.²²⁸

Tidak hanya di luar kelas, di dalam kelas pun buku-buku teks PMP ramai dibicarakan. Misalnya, seorang siswa di SMA Kanisius, Jakarta yang mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang tidak mempertimbangkan keadaan rakyat, padahal jika setiap keputusan berdasarkan Pancasila seharusnya juga berlandaskan perikemanusiaan. Tidak hanya pertanyaan di atas yang diajukan oleh siswa, masih banyak pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai DPR, korupsi yang terkait dengan isi buku-buku PMP. Menurut

²²⁴ *Kompas*, 23 Februari 1982.

²²⁵ *Ibid.*

²²⁶ *Kompas*, 23 Februari 1982.

²²⁷ *Pelita*, 24 Februari 1982.

²²⁸ *Pelita*, 2 Februari 1982.

seorang guru, siswa-siswa tidak hanya diberikan materi yang tertera dalam buku-buku PMP, tetapi harus dikembangkan sendiri.²²⁹

Bagi siswa-siswa di sekolah PMP bukanlah pelajaran yang menarik. Hal ini dikarenakan penyajian buku-buku teks PMP untuk tingkat SMA kurang memaparkan beberapa peristiwa yang menjelaskan Pancasila hingga tertuang dalam Ketetapan MPR. Selain penyajian yang kurang menarik, buku-buku PMP terlalu bertele-tele. Buku-buku teks PMP tingkat SMA yang berjumlah tiga jilid bisa diringkas menjadi 20 halaman saja.²³⁰

Hal-hal yang terkait agama tidak menjadi masalah di sekolah-sekolah Katolik, sedangkan di sekolah-sekolah negeri dan sekolah-sekolah Islam yang mayoritas murid-muridnya beragama Islam masalah isi buku-buku PMP ditanggapi cukup kritis. Di sekolah-sekolah Islam masalah agama yang disinggung dalam buku-buku PMP sedikit bermasalah. Guru-guru PMP yang mengajar di sekolah Islam lebih memilih untuk menyisihkan persoalan tersebut. Jika ada siswa yang membaca sendiri bagian itu, guru PMP akan memberitahukan hal tersebut hanya sebagai pengetahuan supaya siswa-siswa tidak mengalami kebingungan. Permasalahan yang dikesampingkan oleh guru PMP tersebut adalah mengenai redaksi “semua agama itu suci” juga mengenai aliran kepercayaan.²³¹

IV. 3 Tanggapan dari Pemerintah

Penolakan tidak hanya datang dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan DDII, tetapi juga dari Departemen Agama. Departemen Agama melakukan kajian lebih mendalam mengenai persepsi golongan Islam terhadap buku-buku teks PMP.

Berdasarkan penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Pendidikan Agama Departemen Agama yang bertujuan untuk (1) mengetahui berbagai pendapat kalangan masyarakat yang terlibat dalam pendidikan tentang buku-buku teks PMP, (2) mengetahui seberapa jauh penyimpangan atau pertentangan materi PMP dengan ajaran agama Islam, sebagaimana diresahkan

²²⁹ “Pak Guru Sebagai Kunci”, *Tempo*, 13 Februari 1982.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ *Ibid.*

masyarakat selama ini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa buku-buku PMP diharuskan untuk direvisi karena banyak hal-hal yang bertentangan dengan akidah Islamiyah.²³²

Sebagai tindak lanjut atas penelitian tersebut, Menteri Agama telah bertindak cepat dengan menyarankan kepada Presiden Soeharto agar segera membentuk tim perbaikan buku PMP. Tim telah ditunjuk dan telah berhasil menyelesaikan perbaikan-perbaikan yang diharapkan umat. Departemen Agama berharap agar perbaikan tersebut segera diikuti tindak lanjut oleh Departemen Pendidikan & Kebudayaan.²³³

Selain tanggapan dari Departemen Agama dan FPP, Presiden Soeharto memerintahkan kepada Roeslan Abdulghani sebagai Ketua BP7²³⁴ ((Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) untuk merevisi buku PMP.²³⁵ Menurut Roeslan Abdulghani, pokok keberatan tim adalah pada agama yang ditonjol-tonjolkan. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan tidak perlu ditanyakan apakah orang Islam atau Kristen.²³⁶ Hal ini dikarenakan PMP tidak anti agama, tetapi menghormati dan mengagungkan agama.²³⁷

Selain anggota DPR yang berpendapat mengenai permasalahan buku PMP, BP 7 pun berpendapat mengenai permasalahan ini. Kepala BP-7 Tingkat Nasional Hari Suharto menegaskan:

“jangan bandingkan Pancasila dengan Agama. Pancasila bukan Agama dan Pancasila tidak akan mendesak Agama. Agama sifatnya universal, dunia, dan akhirat. Sedangkan Pancasila sifatnya nasional hanya dunia saja hanya mengatur bagaimana kita hidup berbangsa. Dengan taat beragama, kita mudah melaksanakan Pancasila dan dengan Pancasila Agama akan tumbuh subur dan berkembang. Mengamalkan Pancasila harus secara bulat dan utuh. Kita bukan negara agama juga bukan negara sekuler. Bukan

²³² Badan Litbang Agama Departemen Agama. *Upaya Pelestarian dan Peningkatan Mutu Umat Islam dalam Negara Pancasila: Analisa dari Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Agama Tahun 1979-1981*. Hlm. 7-8.

²³³ *Ibid.*

²³⁴ BP7 sebagai badan pelaksana P4 yang berkedudukan di Jakarta dengan Roeslan Abdulghani sebagai ketuanya. BP7 bertugas untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Lihat dalam Departemen Komunikasi dan Informasi. *Perjalanan Bangsa Berdemokrasi... op. cit.*, hlm. 160.

²³⁵ *Kompas*, 22 Januari 1982.

²³⁶ *Tempo*, Buku yang... *loc. cit.*, hlm., 64.

²³⁷ *Pelita*, 10 Februari 1982.

negara agama artinya mendasarkan falsafah negara pada salah satu agama.²³⁸

Prof. Darji Darmodiharjo yang menjabat sebagai Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berwenang mengenai pendidikan Pancasila mengatakan bahwa:

“PMP bukan buku agama, baik dilihat dari satu agama tertentu atau semua agama yang diakui di Negara ini. PMP adalah pendidikan moral yang dijiwai oleh Ketuhanan YME atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuan PMP adalah mendidik anak didik menjadi manusia yang baik dan WNI yang baik. Anak didik di ajak percaya pada Tuhan YME menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka juga diajarkan saling menghormati dan bekerjasama satu sama lain. PMP bermaksud mendidik anak didik tahu hak dan kewajiban sebagai WNI. Mereka juga perlu tahu GBHN, Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa. PMP yang diterbitkan saat ini berdasarkan Tap MPR tahun 1978. Sebenarnya PMP sudah ada berdasarkan GBHN tahun 1973 yang isinya tidak jauh berbeda. Departemen P & K menerima kritik dan masukan atas penerbitan PMP tahun 1979/1980. Akan tetapi, kritikan tersebut lebih bersifat politis, misalnya penolakan atas P4, Pancasila, dan UUD 1945, tapi ada pula yang setuju dengan P4, Pancasila, dan UUD 1945, tetapi menolak PMP. Pelajaran PMP di kalangan pendidik tidak ada masalah.”²³⁹

Dalam Tajuk mengenai permasalahan buku PMP yang dimuat oleh *Suara Karya*, ditegaskan kembali bahwa PMP bukanlah pelajaran agama.

“...Buku ini diterbitkan berdasarkan Tap MPR No. II tahun 1978, antara lain dinyatakan bahwa P4 diperlukan demi kesatuan bahasa, kesatuan pandangan dan kesatuan gerak langkah dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara RI perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita-cita bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. PMP tidak dapat diajarkan bahwa satu agama lebih dari agama yang lain, atau kepercayaan kepada Tuhan YME lebih rendah derajatnya daripada agama-agama atau suatu agama. PMP adalah pendidikan kewarganegaraan bagi generasi muda RI yang berpandangan hidup dan berdasarkan Pancasila. PMP bukan, misalnya pelajaran agama.”²⁴⁰

Jika dibandingkan dengan buku PMP yang diterbitkan tahun 1978, buku PMP yang diterbitkan sejak Oktober 1980 dianggap lebih baik meskipun tetap ada

²³⁸ *Suara Karya*, 25 Januari 1982.

²³⁹ *Suara Karya*, 10 Februari 1982.

²⁴⁰ *Suara Karya*, 11 Februari 1982.

kekurangannya. Dalam *Kompas* diuraikan kelebihan dan kekurangan buku PMP yang diterbitkan tahun 1980 yaitu:

“(1) langsung ke inti permasalahan; (2) tiap bab diberikan rangkuman atas pengertian pelajaran yang disampaikan serta tugas dan pertanyaan. Pokok permasalahan selalu beranjak dari diri sendiri dan meluas sampai kepada keluarga dan masyarakat. Sedangkan kekurangan dari buku PMP tersebut adalah (1) Pertanyaan yang diajukan aneh, (2) Evaluasi check point/multiple choice lebih mengandalkan hafalan sesaat se usai ulangan, hal-hal yang semula hafal luar kepala, tidak lagi dimengerti oleh anak-anak. (3) Jika belajar dari buku evaluasi juga ada keharusan membaca surat kabar. Hal itu menyulitkan anak-anak di daerah.”²⁴¹

FKP mendukung pernyataan-pernyataan yang datang dari BP7 maupun Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menganggap tidak perlu diadakan perubahan asasi karena buku PMP sudah sesuai dengan P4 dan Pancasila.²⁴²

Pada 31 Agustus 1982, setelah bekerja selama kurang lebih 8 bulan untuk meneliti lebih mendalam bagian dari buku PMP yang perlu diperbaiki, tim perbaikan buku PMP dibawah pimpinan Moerdiono menghadap Presiden Soeharto untuk melaporkan kinerjanya. Presiden Soeharto menyetujui penyempurnaan yang dilakukan tim tersebut dan menginstruksikan untuk segera mencetaknya. Untuk menyempurnakan buku PMP dibentuklah tim interdepartemen yang beranggotakan, sebagai berikut:²⁴³

1. Sekretaris Kabinet.
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Prof. Darji Darmodiharjo, SH.
3. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Anton Timur Djaelani, MA.
4. Kepala Litbang Depdagri Djamaludin Tambunan.
5. Deputi Bidang Pengkajian dan Pengembangan BP7 Padmo Wahjono

Menurut Moerdiono, terdapat 216 masalah yang ditemukan di dalam buku-buku PMP. Permasalahan tersebut menyangkut kaidah agama, psikologis, ketepatan uraian atau fakta dan masalah redaksional. Adapun 216 masalah tersebut secara terperinci terdapat 89 masalah untuk buku PMP tingkat SD, 56

²⁴¹ *Kompas*, 25 Januari 1982.

²⁴² *Suara Karya*, 1 Maret 1982.

²⁴³ *Kompas*, 1 September 1982.

masalah untuk buku PMP tingkat SLTP, dan 71 masalah untuk buku PMP tingkat SLTA.²⁴⁴

Revisi yang dilakukan oleh tim tersebut hanya menjernihkan dan memperjelas hal-hal yang menimbulkan salah pengertian. Seperti redaksi "...semua agama itu baik dan suci" diganti menjadi "...semua agama itu baik dan suci menurut pemeluknya masing-masing". Tim mengharapkan setelah menjernihkan buku-buku PMP diharapkan tidak ada masalah lagi. Tim juga berpendapat PMP bukan buku agama atau buku pendidikan agama, selain itu buku PMP tidak boleh bertentangan dengan agama. Penyempurnaan yang dilakukan oleh tim bertolak ukur pada Pembukaan UUD 1945, UUD 1945 serta penjelasan, Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN.²⁴⁵

Buku-buku PMP edisi lama digantikan oleh buku-buku PMP edisi baru. Penggantian buku berdasarkan Kepmen P dan K No. 137/C/Kep/1983 tanggal 3 Agustus 1983 dan Instruksi Menteri P dan K No.4/M/83 tanggal 4 Agustus 1983. Menurut Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Darji Darmodiharjo selaku Ketua Tim Pengendali Pusat Penggantian Buku Edisi Lama dengan edisi baru, buku lama berasal dari pengadaan tahun 1979/1980 jumlahnya 8.748.393 eksemplar. Setelah penyempurnaan tahap pertama sejumlah 7.046.874 eksemplar. sampai tahun 1983/1984 sejumlah 40.457.126 eksemplar.²⁴⁶

Pada 5 Agustus 1983, buku-buku PMP yang lama secara simbolik di musnahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Nugroho menghimbau agar jangan membeli buku-buku PMP edisi lama. Buku-buku PMP edisi lama tetap dipergunakan sambil menunggu sebelum pihak sekolah mendapatkan buku-buku PMP edisi baru.²⁴⁷ Buku PMP edisi lama ditarik dari peredaran karena ada bagian-bagian yang dinilai menimbulkan salah paham di kalangan masyarakat dan memancing pertentangan khususnya di kalangan umat beragama.²⁴⁸

²⁴⁴ *Ibid.*

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ *Kompas*, 6 Agustus 1983.

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ Tajuk Rencana "Buku Baru PMP" *Kompas*, 8 Agustus 1983.

Sampai Januari 1984, siswa belum mendapatkan buku PMP edisi baru padahal sudah lima bulan yang lalu buku PMP edisi lama ditarik dari peredaran. Keadaan ini menyebabkan siswa belajar PMP tanpa buku dalam jangka waktu yang cukup lama. Sebagian besar toko buku di Jakarta pun mengaku belum pernah menjual buku-buku PMP edisi baru yang diedarkan oleh Departemen Pendidikan & Kebudayaan.²⁴⁹

Menanggapi berita yang beredar mengenai buku-buku PMP edisi baru yang belum diterima di berbagai sekolah Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nugroho mengakui keadaan tersebut. Masalah transportasi menjadi kendala pembagian buku PMP yang belum merata. Nugroho dihadapkan pada masalah, yaitu pengiriman pada daerah-daerah tertentu dulu atau dikirim merata tetapi dalam jumlah sedikit. Maka, Menteri P dan K memilih untuk melakukan pilihan kedua.²⁵⁰

Setelah buku-buku PMP edisi baru beredar, kembali muncul tanggapan mengenai hasil revisi tersebut. Natsir sebagai salah seorang tokoh yang gigih memperjuangkan masalah ini mengatakan buku ini belum benar-benar direvisi. Natsir menyarankan agar buku-buku PMP edisi baru ditarik kembali dan diganti dengan buku kewarganegaraan (*civics*) yang tidak menyinggung mengenai persoalan agama dan aliran kepercayaan. Permasalahan moral diharapkan menjadi tanggungan agama saja.²⁵¹

Selain Natsir, anggota MPR Husni Thamrin juga memberikan pendapat mengenai revisi buku-buku PMP tersebut. Menurut Thamrin, revisi buku PMP ibarat menggunting ranting dan cabang pohon, sementara pohonnya akan terus tumbuh. Yang dimaksud pohon dalam analogi tersebut adalah isi buku-buku PMP yang tidak disetujui tokoh-tokoh Islam. Menurutnya, jika ingin buku PMP bersih dari protes yang dilakukan umat Islam sebaiknya mengganti seluruhnya dengan buku PMP baru.²⁵²

²⁴⁹ “Buku PMP Baru Belum Dibagi Merata”, *Serial Media Dakwah* no. 116 Robi’ul Akhir 1404 H/September 1983. Hlm. 2-3.

²⁵⁰ *Kompas*, 20 Oktober 1983.

²⁵¹ “Buku PMP Baru...” *loc. cit.*, hlm., 6-7.

²⁵² “Revisi Buku PMP Ibarat Menggunting Ranting dan Cabang Pohon.” *Serial Media Dakwah* no. 116 Robi’ul Akhir 1404 H/September 1983. Hlm.8.

Thamrin juga menambahkan agar umat Islam membuat buku PMP tandingan untuk diajukan kepada Presiden. Thamrin mengusulkan agar tokoh-tokoh Islam membuat buku-buku PMP tandingan yang tidak bertentangan dengan akidah Islam juga tidak bertentangan dengan GBHN, Pancasila, dan UUD 1945. Thamrin meyakinkan jika buku tersebut memenuhi kriteria tersebut pemerintah akan menerima dan bersedia mengganti buku-buku PMP. Akan tetapi, usulan Thamrin tersebut tidak dapat terealisasi.²⁵³

Pemerintah tetap mengedarkan buku-buku PMP edisi revisi meskipun perubahan secara menyeluruh yang dituntut oleh DDII tidak pernah terealisasi. Buku-buku PMP memang dimaksudkan sebagai indoktrinasi bagi murid-murid tingkat SD, SLP, dan SLTA.

IV. 4 Tanggapan dari Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan pun memberikan pandangannya mengenai polemik yang terjadi atas penerbitan buku-buku PMP. Majelis-majelis agama menghimbau agar semua pihak tidak mempertentangkan Pancasila dengan agama. Wadah Musyawarah Umat Beragama menegaskan kembali bahwa majelis-majelis agama dan organisasi-organisasi keagamaan sebagai pembina umat beragama yang mempunyai keyakinan menurut agama masing-masing, bertujuan untuk menerima umatnya masing-masing agar menjadi pengikut/pemeluk agama yang taat, sekaligus kewarganegaraan yang Pancasila. Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh MUI diwakili oleh Syukri Ghazali dan R. S. Prodjokusumo, DGI (Dewan Gereja-gereja di Indonesia) diwakili oleh S. A. E. Nababan dan Prof. Dr. Latuhamailo, MAWI (Majelis Wali Agung Gereja Indonesia) diwakili oleh Mgr. Leo Sukoto dan Mgr. Harsono, PHD (Parisada Hindu Darma) diwakili oleh Ida Bagus Oka Puniaatmadja dan I Wayan Surpa, Walubi (Perwalian Umat Budha Indonesia) diwakili oleh Sumantri MS dan Anwar Djunaidi.²⁵⁴

Selain bersama dengan wadah umat beragama lainnya, MAWI juga mengadakan rapat dengar pendapat dengan DPR. Dalam rapat dengar pendapat tersebut MAWI yang dipimpin oleh sekretaris Mgr Leo Soekoto SJ dan Dr. J.

²⁵³ *Ibid.*

²⁵⁴ *Kompas*, 8 Oktober 1982.

Riberu (Kepala Bagian Dokumentasi/ Penerangan, Drs F. Darmanto (Komisi Pendidikan) menyatakan bahwa Pancasila merupakan statement politik, bukan statement teologi oleh karena itu, semua warga negara harus merasa terikat pada Pancasila sebagai pedoman tingkah laku, baik dalam bermasyarakat maupun bernegara.²⁵⁵

MAWI juga memberikan pandangannya mengenai permasalahan buku-buku PMP. Menurut MAWI, PMP diperlukan untuk mempersiapkan anak didik bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sebagai pedoman tingkah laku atau dalam kehidupan sehari-hari moral tingkah laku bernegara. Sebagai statement politik, Pancasila jangan mencampuri urusan yang tidak berada langsung di dalam wewenangnya. Menurut Mgr. Leo Soekoto, Pancasila juga merupakan sumber moral selain dari wahyu selama tidak bertentangan dengan wahyu dan mengikat secara moral. Moral Pancasila hanya untuk hidup bernegara. Pancasila jangan diartikan moral yang komplit yang dapat mengatur segala-galanya. Pancasila hanya untuk mengatur bernegara di Indonesia.²⁵⁶

Pada 4-8 Maret 1984 diadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, tetapi dalam rakernas tersebut MUI²⁵⁷ tidak menyinggung masalah buku-buku PMP yang menjadi salah satu masalah umat Islam. Akan tetapi, menurut Ketua MUI Sumatera Barat yang juga salah seorang peserta rakernas Dt. Palimokayo menyatakan masalah PMP bukan berarti tidak pernah dibicarakan. Permasalahan tersebut selalu tidak mendapatkan tanggapan untuk dibicarakan lebih lanjut oleh ketua sidang. Jika masalah ini mendapat tanggapan, ketua sidang akan memberikan alternatif agar permasalahan ini dibicarakan dalam forum lain selain rakernas.²⁵⁸

²⁵⁵ *Kompas*, 23 November 1982.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ MUI dibentuk sebagai hasil kesepakatan dalam Musyawarah Nasional Para Ulama yang diselenggarakan pada 21-27 Juli 1975. MUI bertujuan untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN yang diridhoi oleh Allah SWT. Lihat dalam *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VII... op. cit.*, hlm., 303.

²⁵⁸ "Rakernas MUI Bahas: Soal Asas Jilbab dan PMP," *Serial Media Dakwah* no.118 Rajab 1404 H/10 April 1984 M.